

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008 – 2015**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Rifqi Indrawan
NIM : 14313168
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008 – 2015

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata-1

Jurusan Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Muhammad Rifqi Indrawan

NIM : 14313168

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2018

Penulis,



Muhammad Rifqi Indrawan

HALAMAN PENGESAHAN

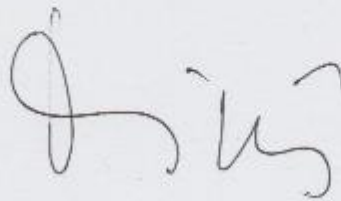
**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008 – 2015**

Nama : Muhammad Rifqi Indrawan
NIM : 14313168
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Februari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Diana Wijayanti, Dra., M. Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI
PROVINSI DIY PERIODE TAHUN 2008-2015**

Disusun Oleh : **MOHAMMAD RIFQI INDRAWAN**

Nomor Mahasiswa : **14313168**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 14 Maret 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.

Penguji : Nur Feriyanto, Dr., M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan segala bentuk nikmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lain dan bukan,

Skripsi inipun kupersembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu yang telah memberikan berbagai bentuk motivasi maupun dukungan sekaligus pengorbanan demi tercapainya kesuksesan penulis di masa depan. Hanya doa merekalah yang dapat menghantarkan penulis hingga seperti sekarang ini.
- ❖ Almarhumah adekku *Destiya Rahmadani* yang telah mengiringi dalam proses penulisan skripsi ini. Sungguh penulis telah merasa kehilangan salah satu motivasi terbesar bagi hidup penulis
- ❖ Seluruh teman – teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kalian semua adalah partner yang telah mengisi setiap lembaran kehidupan, semoga kita dapat meraih setiap bentuk cita- cita yang diharapkan.

HALAMAN MOTTO

“ Berdoalah (mintalah) kepada-Ku (Allah SWT), pastilah Aku kabulkan untukmu.” (QS. Al – Mukmin : 60)

“ Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka – sangkanya.” (QS. Ath – Tholaq : 2-3)

“ Sebaik – baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.” (HR. Ahmad, Ath – Thabrani, ad-Daruqutni)

“Hidup adalah soal pilihan. Tak masalah seberapa maju atau tertinggal kah langkahmu, yang terpenting kau akan selalu datang dengan penuh tanggung jawab di setiap pilihanmu.” (Rifqi Indra)

“

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala bentuk rahmat serta taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat besertakan salam tetap tercurahkan kepada Baginda kita semua Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat – sahabatnya yang mana kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Tanpa Beliau kita tidak dapat menghirup harumnya iman dan Islam sebagai satu – satunya agama yang di Ridhoi oleh Allah SWT.

Alhamdulillah, penulis dalam hal ini diperkenankan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2008 – 2015”. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya ditujukan kepada ibu **Diana Wijayanti, Dra., M. Si.** selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran, maupun motivasi hingga proses penyusunan skripsi ini selesai.

Dalam hal ini tentunya penulis sangat menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kemampuan yang dimiliki dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan

yang perlu diperbaiki. Masukan serta saran tentunya sangat dibutuhkan guna dapat mengoreksi serta memperbaiki atas kekurangan yang ada sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dengan berbagai keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan semata – mata disusun atas kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, penulis dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, atas berbagai bentuk kenikmatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
2. **Keluarga penulis**, yang senantiasa memberikan kesempatan, dukungan, maupun dorongan dalam studi secara moral maupun material dengan dibarengi untaian doa dan kasih sayang sehingga menjadi motivasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi
3. **Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
4. **Bapak Drs. Akhsyim Affandi, MA.Ec., Ph.D** selaku kepala Program Studi Ilmu Ekonomi
5. **Ibu Diana Wijayanti, Drs., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi
6. **Seluruh Dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi** Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada para mahasiswa

7. **Seluruh teman – teman IE 2014** yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Senang bisa mengenal kalian semua, semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya di masa depan kelak.
8. **Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia** termasuk seluruh santri dan pengasuh pondok yang telah berjasa besar dalam studi penulis. Tanpa dukungan moral maupun material mungkin penulis tidak dapat seperti sekarang ini
9. **Keluarga kecilku santri PP UII angkatan 2014**, terima kasih atas kebersamaanya selama ini.
10. Seluruh teman – teman yang pernah bekerja sama dalam berbagai bidang, KKN unit 155, LDF JAM FE UII, Bridging Program, maupun LES FE UII.
Semoga persaudaraan dan silaturahmi kita dapat terus terjaga hingga nanti
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga segala bentuk bantuan, bimbingan, maupun pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2018

Penulis

Muhammad Rifqi Indrawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah Penelitian	10
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
2.1.Kajian Pustaka	13
2.2.Landasan Teori	17
2.2.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan	17
2.2.2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	20

2.2.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	23
2.2.3.1. Investasi.....	24
2.2.3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	28
2.2.3.4. Indeks Gini	31
2.2.4. Hubungan Antar Variabel Independent dengan Variabel Dependent	34
2.2.4.2. Hubungan Antara IPM dengan Kemiskinan	35
2.2.4.3. Hubungan Antara Indeks Gini dengan Kemiskinan.....	36
2.2.5. Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis dan Sumber Data	38
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	38
3.2.1. Variabel Independen	38
3.2.2. Variabel Dependen	40
3.3. Metode Analisis Data	41
3.4. Uji Kesesuaian Model Dalam Pengolahan Data.....	44
3.4.1. Uji Chow.....	44
3.4.2. Uji Hausman	45
3.4.3. Uji Langrange Multiplier (LM)	46
3.5. Pengujian Hipotesis.....	46
3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2).....	46
3.5.2. Uji F.....	47
3.5.3. Uji t	48
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	49
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
4.1.1. Sekilas Tentang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	49

4.1.2. Keadaan Geografis dan Demografis	50
4.2.Deskripsi Data Penelitian	52
4.3.Deskripsi Objek Data Penelitian	53
4.3.1. Perkembangan Kemiskinan	53
4.3.2. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	54
4.3.3. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	56
4.3.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	57
4.3.5. Perkembangan Indeks Gini	58
4.4.Hasil Analisis Regresi	59
4.4.1. Pemilihan Model Data Panel	60
4.4.1.1. Uji Chow	60
4.4.1.2. Uji Hausman	61
4.4.1.3. Estimasi Fixed Effect Model	62
4.4.1.4. Koefisien Determinasi (R^2)	63
4.4.1.5. Uji F	63
4.4.1.6. Uji t	64
4.4.1.7. Analisis Kabupaten	65
4.5.Interpretasi Hasil	66
4.6.Analisis Ekonomi.....	68
4.6.1. Analisis Pengaruh Variabel PMDN Terhadap Kemiskinan	68
4.6.2. Analisis Pengaruh Variabel PMA Terhadap Kemiskinan	70
4.6.3. Analisis Pengaruh Variabel IPM Terhadap Kemiskinan	72
4.6.4. Analisis Pengaruh Variabel Indeks Gini Terhadap Kemiskinan	76
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	80
5.1.Kesimpulan	80

5.2. Implikasi	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90
Lampiran 1 (Data Penelitian).....	91
Lampiran 2 (Hasil Estimasi)	93
Lampiran 3 (Hasil Uji Model Estimasi).....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DIY (satuan ribu jiwa)	2
Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa.....	4
Tabel 1.3 Rasio Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin	6
Tabel 4.1 Luas Wilayah,Jumlah,Kepadatan,dan Laju Pertumbuhan	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota DIY	54
Tabel 4.3 Jumlah PMDN di Kabupaten/Kota DIY	55
Tabel 4.4 Jumlah PMA di Kabupaten/Kota DIY	56
Tabel 4.5 Persentase IPM di Kabupaten/Kota DIY	57
Tabel 4.6 Persentase Indeks Gini di Kabupaten/Kota DIY	59
Tabel 4.7 Hasil Regresi Uji <i>Chow</i>	60
Tabel 4.8 Hasil Regresi Uji <i>Hausman</i>	61
Tabel 4.9 Estimasi <i>Fixed Effect Models</i> (FEM).....	62
Tabel 4.10 Hasil Analisis Kabupaten.....	65
Tabel 4.11 Perhitungan Konstanta perKabupaten.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Luas Wilayah Setiap Provinsi di Jawa	5
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan	21
Gambar 2.2 Kurva Lorenz.....	33
Gambar 4.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota DIY	51

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2008 – 2015. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data Badan Pusat Statistik maupun publikasi dan sumber – sumber lain yang mendukung penelitian ini. Variabel dependen yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin (Y), sedangkan variabel independennya adalah PMDN (x1), PMA (x2), IPM (x3), dan Indeks Gini (x4). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel (pooled data) dengan model regresi Fixed Effect. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan menggunakan model regresi Fixed Effect tersebut, menghasilkan bahwa variabel PMDN, PMA, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY yaitu dengan rincian nilai investasi (PMDN dan PMA) berpengaruh negatif sedangkan IPM berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel Indeks Gini berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY pada periode tahun 2008 – 2015. Hal ini disebabkan karena masih adanya keterkaitan tentang budaya dan kemampuan penduduk miskin dalam menjangkau berbagai kebutuhan pokok setiap harinya.

Kata Kunci : *DIY, PMDN, PMA, IPM, Indeks Gini*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 337.230 per orang per bulan. Penetapan angka Rp 337.230 per orang per bulan tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar), Pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah), dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Masalah kemiskinan memang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh setiap negara. Tidak memandang apakah negara tersebut maju maupun negara yang sedang berkembang, kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang terus dicarikan strategi pemecahannya. Kemiskinan memang bukan hanya masalah ketidakmampuan secara ekonomi semata, akan tetapi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup keluarganya maupun untuk diri sendiri. Termasuk juga adanya perbedaan antara seseorang maupun

kelompok terhadap yang lainnya dalam menjalani kehidupan yang lebih bermartabat.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa di Indonesia pun selalu berupaya dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program – program yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi DIY. Dimuat dalam halaman HarianJogja.com, program – program tersebut dapat dirinci sebagai berikut, pertama, program proteksi yang berguna untuk memberikan perlindungan bagi ketidakberdayaan penduduk miskin, kedua, program pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas masyarakat sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan ketiga, sebagai yang terakhir yaitu program pemberian akses perekonomian dengan penciptaan banyak lapangan kerja baru sebagai upaya dalam menurunkan tingkat pengangguran yang ada. (Jiwana, 2017)

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2008-2015
(satuan ribu jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kulonprogo	97.9	89.9	90.0	92.8	92.4	86.5	84.7	88.1
Bantul	164.3	158.5	146.9	159.4	158.8	156.6	153.5	160.2
Gunung Kidul	173.5	163.7	148.7	157.1	156.5	152.2	148.4	155.0
Sleman	125.1	117.5	117.0	117.3	116.8	110.8	110.4	111.01
Kota Yogyakarta	48.1	45.3	37.8	37.7	37.6	35.6	36.6	36.0
DIY	616.30	585.78	577.30	560.88	562.11	535.18	532.59	485.56
Indonesia	34963.30	32529.97	31023.39	30018.93	28594.64	28553.93	27727.78	28513.57

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten / Kota di Provinsi Yogyakarta selalu mengalami fluktuatif dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Adapun selama kurun waktu 8 tahun yaitu antara tahun 2008 hingga tahun 2015 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar adalah kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah 173,5 ribu jiwa di tahun 2008. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada pada Kota Yogyakarta dengan jumlah 35,6 ribu jiwa di tahun 2013.

Dalam hal ini jika dilihat dari angka provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami penurunan dalam hal jumlah penduduk miskin kecuali pada tahun 2012 yang meningkat dari 560.88 ribu jiwa di tahun 2011 menjadi 562.11 ribu jiwa. Namun tingkat kemiskinan di Provinsi DIY masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah – daerah lain khususnya di seluruh provinsi di pulau Jawa dilihat dari persentase kemiskinan di setiap provinsi. Bahkan, persentase penduduk miskin DIY selalu berada di atas angka nasional yang mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi DIY dapat menjadi perhatian khusus dalam rangka penciptaan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2008-2015

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	4.29	3.62	3.48	3.75	3.70	3.72	4.09	3.61
Jawa barat	13.01	11.96	11.27	10.65	9.89	9.61	9.18	9.57
Jawa tengah	19.23	17.72	16.56	15.76	14.98	14.44	13.58	13.32
DI Yogyakarta	18.32	17.23	16.83	16.08	15.88	15.03	14.55	13.16
Jawa timur	18.51	16.68	15.26	14.23	13.08	12.73	12.28	12.28
Banten	8.15	7.64	7.16	6.32	5.71	5.89	5.51	5.75
Indonesia	15.42	14.15	13.33	12.49	11.66	11.47	10.96	11.13

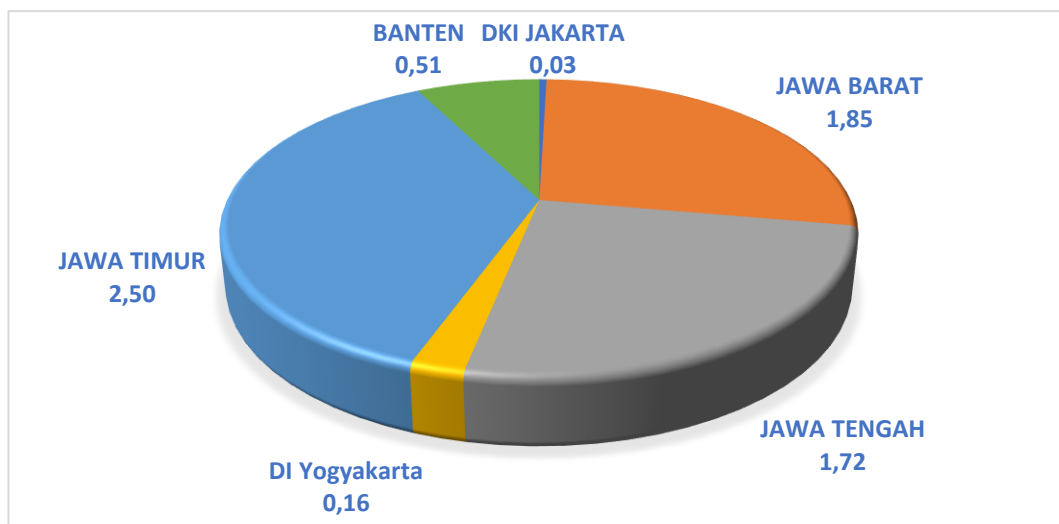
Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Dari table 1.2 tersebut menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 menempati posisi pertama sebagai daerah termiskin di pulau Jawa. Data menunjukkan presentase penduduk miskin di DIY masing – masing sebesar **15,03%** dan **14,55 %**. Angka tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012, namun tingkat kemiskinan di DIY tetap menjadi terbesar di antara seluruh provinsi di Jawa (Atmasari, 2017). Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu provinsi pastilah tidak terlepas dari factor – factor yang menyebabkan kemiskinan tersebut dapat terjadi. Dari sinilah factor – factor tersebut dapat dijadikan pedoman bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang sedang menimpa daerah tersebut.

Hal ini menjadi menarik karena jika dilihat menurut luas wilayah provinsi se – Jawa terhadap Indonesia, persentase luas wilayah DIY terhadap Indonesia dengan provinsi lain se- Jawa hanya sebesar 0,16 persen. Sedangkan persentase

penduduk miskin DIY se-Jawa adalah sebesar 13,16 persen yang merupakan angka tertinggi setelah provinsi Jawa Tengah. Hal inilah yang menunjukkan bahwa DIY merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berikut penulis hadirkan persentase luas wilayah setiap provinsi se-jawa terhadap luas Indonesia sekaligus tabel rasio antara rata – rata jumlah penduduk miskin se-Jawa dengan luas wilayah setiap provinsi di Pulau Jawa :

Gambar 1.1
Persentase Luas Wilayah Provinsi se-Jawa Terhadap Luas Wilayah Indonesia



Sumber : BPS (Diolah)

Tabel 1.3
Rasio Rata – rata Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Luas Wilayah di
setiap Provinsi Se-Jawa

Provinsi	Rata -rata Jumlah	luas wilayah	Rasio
	Penduduk Miskin	(Km2)	
Dki Jakarta	362,79	664,01	0,55
Jawa Barat	4657,13	35377,76	0,13
Jawa Tengah	5128,46	32800,69	0,16
Di Yogyakarta	556,96	3133,15	0,18
Jawa Timur	5363,77	47799,75	0,11
Banten	715,53	9662,92	0,07

Sumber : BPS (diolah)

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa Provinsi DIY memiliki luas daerah yang tidak terlalu luas akan tetapi memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain se-Jawa. Bahkan jika dilihat dari angka rasio yang ditunjukkan, Provinsi DIY merupakan Provinsi dengan angka rasio tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dengan tingkat persentase kemiskinanannya di atas angka Nasional. Hal inilah yang menjadi alasan lain penulis dalam memilih Provinsi DIY sebagai studi kasus utama dalam melaksanakan penelitian.

Todaro (Todaro, 2005) dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga” mengatakan bahwa tujuan utama dari usaha – usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pembangunan yang sebesar- besarnya adalah juga harus pula dapat menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan yang ada. Oleh karena itu, salah satu yang dijadikan indikator dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional

adalah penurunan laju jumlah penduduk miskin yang dapat dilakukan sebagai langkah utama dalam memilih strategi pembangunan di suatu daerah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus tidak lain adalah beorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin. Termasuk juga di dalamnya upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari factor – factor yang mempengaruhi angka kemiskinan tersebut dapat terjadi. Seperti tingkat investasi, kesehatan, Pendidikan, distribusi pendapatan maupun kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Tingkat investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Menurut Sadono Sukirno (2012) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dengan meningkatnya nilai investasi yang ada, akan berpengaruh terhadap jumlah output yang diciptakan , yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah . (Minggu, 2017)

Kegiatan investasi tersebut pun terbagi menjadi dua penanaman modal yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya menjadi sama penting karena merupakan langkah awal dalam melakukan pembangunan ekonomi (Reza Lainatul Rizky, 2016). Dari data BPS Yogyakarta, berdasarkan harga konstan 2010, perkembangan nilai investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010–2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai investasi atas dasar harga konstan mencapai Rp. 18,47 triliun, kemudian

terus meningkat menjadi Rp. 23,26 triliun pada tahun 2015. Secara umum rata-rata pertumbuhan investasi di DIY selama periode 2010 - 2015 sebesar 4,73 persen per tahun (BPS DIY) (BAPPEDA, 2016). Hal ini menunjukkan perkembangan yang terus menerus terjadi pada sector investasi di Provinsi DIY.

Selain itu kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi factor penyebab terjadinya penduduk miskin di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia pun dapat dilihat melalui indeks kualitas hidup / Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin yang terjadi di suatu daerah termasuk yang terjadi pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu yang menentukan kualitas SDM tersebut dapat terbentuk. Di Yogyakarta melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jika dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS) penduduk yang berusia di atas umur 15 tahun dalam dua tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 APS DIY menunjukkan angka sebesar 86,78 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 86,44 persen. Angka ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga sebesar 87,20 persen (Antara, 2017). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terus menerus dalam sektor pendidikan di daerah provinsi Istimewa Yogyakarta. Tentunya akan sangat berdampak pada tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut.

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data dari BPS menunjukkan pada tahun 2015 IPM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 77,59 menempati posisi tertinggi di Indonesia, setelah IPM Provinsi DKI Jakarta yang mencapai angka 78,99 menempati posisi tertinggi pertama di Indonesia. Hal ini dapat dirinci bahwa IPM DKI Jakarta pada tahun 2014 sebesar 78,39, atau meningkat 0,77% dibanding IPM tahun 2015 sebesar 78,99. Sedangkan IPM DIY tahun 2014 sebesar 76,81 atau meningkat 1,02% dibanding IPM tahun 2015 sebesar 77,59 (Sihombing, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa DIY memiliki tingkat pembangunan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang lain.

Dalam masalah kemiskinan juga terdapat indikator yang berkaitan dengan kesenjangan distribusi pendapatan, karena kesenjangan distribusi pendapatan berkaitan erat dengan kemiskinan. Indikator tersebut adalah indeks gini yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistika Yogyakarta (1994) indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah indeks gini dan kriteria bank dunia. Kriteria bank dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu : (1) tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan; (2) sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan

terendah menerima 12% - 17% bagian pendapatan; (3) rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini terhadap kemiskinan yang terjadi di Provinsi Yogyakarta. Melalui penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2008 - 2015”** .

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis mencoba meneliti dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2008 – 2015?
2. Apakah variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2008 – 2015?
3. Apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2008 – 2015?
4. Apakah variabel Indeks Gini berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2008 – 2015?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penulis dalam pembahasan kali ini membagi tujuan penelitian menjadi dua hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum penulis dalam melakukan pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi gejala – gejala yang menyebabkan kemiskinan di provinsi Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut sekaligus sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan kedepannya. Sedangkan tujuan khusus penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi Yogyakarta tahun 2008 - 2015
2. Membuktikan adanya pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) provinsi Yogyakarta tahun 2008 – 2015 terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tersebut
3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi Yogyakarta tahun 2008 - 2015
4. Mengetahui pengaruh Indeks Gini terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di Provinsi Yogyakarta tahun 2008 -2015

1.3.2. Manfaat Penelitian

Tentunya dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang besar kepada pihak – pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemegang kebijakan, hasil dari penelitian ini diperlukan untuk menentukan langkah strategis dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan di provinsi Yogyakarta dengan melihat pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan dari setiap variabel yang ada.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi Yogyakarta
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diperlukan untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal penentuan kebijakan terkait program pengentasan kemiskinan.
4. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun referensi untuk melaksanakan penelitian kedepannya atau sekaligus dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Melihat dan mengkaji pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang sama maupun yang berbeda pokok pembahasannya, maka kajian pustaka yang akan dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini melalui konsep – konsep yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian Hastina Febrianty dkk (2017) tentang kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dengan judul “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”, adapun data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu (*time series*) selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2015 yang berasal dari badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan dari laporan – laporan tahunan dan Bank Indonesia (BI) dari Kajian Ekonomi Regional khusus SUMUT. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik regresi linier berganda sebagai model teknik analisis data yang ada. Dari hasil olah data yang ada menghasilkan bahwa variabel PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi SUMUT yang menunjukkan bahwa hasil ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian. Sedangkan untuk variabel Investasi (PMDN) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Jika dilihat dari semua variabel menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, investasi, dan inflasi telah dapat menjelaskan maupun berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. (Febriaty, 2017)

Penelitian tentang variable yang mempengaruhi kemiskinan juga pernah dilakukan oleh Adi Widodo dkk (2011). Yaitu tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sector Pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah dengan periode kajian studi adalah antara tahun 2007 – 2008. Data tersebutpun diperoleh dari data Badan Pusat Statistik, maupun situs – situs lain yang dibutuhkan selama penelitian seperti Bank Indonesia, Bappeda Jawa tengah dan lain – lain. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis statistic deskriptif dan teknik analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sector public tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sector public dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sector Pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variable independen dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berinteraksi dengan variable lain (variable IPM). (Widodo, 2011)

Lavenia Kotambunan dkk (2016) melakukan penelitian tentang kemiskinan yang terjadi di provinsi Sulawesi Utara. Dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (dalam tahun 2005 – 2014). Data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang diambil dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, buku, jurnal, makalah, serta sumber – sumber yang berkaitan yaitu secara time series dengan kurun waktu antara tahun 2005 – 2014

(10 tahun). Metode analisis yang digunakan pun adalah dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan model regresi berganda yang difasilitasi oleh program eviews 8.0. Sehingga penelitian tersebut menghasilkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana ketika belanja modal ditingkatkan, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena masih ada program – program pemerintah yang dianggap masih belum tepat sasaran dan program pemerintah belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya tidak efektif. Selain itu juga karena program yang ada dinilai masih bersifat reaktif, berjangka pendek, dan parsial. Sedangkan variable IPM menghasilkan pengaruh negative terhadap kemiskinan yang ada. Yaitu dengan hasil estimasi yang menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.01433%. (Kotambunan, 2016)

Penelitian lain tentang kemiskinan juga dilakukan oleh Teddy Desly dkk (2017). Dengan menggunakan variable belanja langsung, belanja tidak langsung pemerintah daerah dan investasi swasta, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh belanja langsung dan tidak langsung pemerintah daerah serta tingkat investasi yang ada terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di kota bitung antara tahun 2006 – 2014. Jenis data dan sumber data yang diambil merupakan data sekunder dengan jenis data time series yang bersumber dari berbagai institusi pemerintah yang ada seperti Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bitung, Badan

Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan BAPPEDA kota Bitung. Adapun model analisis yang digunakan adalah dengan analisis regresi berganda dimana yang kita kenal sebagai analisis Ordinary Least Square (OLS). Penelitian ini menghasilkan bahwa variable – variable yang ada mulai dari belanja langsung, belanja tidak langsung, serta investasi ternyata memiliki pengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Sedangkan untuk variable belanja tidak langsung dan investasi di kota bitung, data hasil regresi menunjukkan bahwa keduanya tidak signifikan terhadap variable kemiskinan. Dalam hal ini, penulis menganggap bahwa investasi yang dilakukan tidak bersifat padat karya, sehingga dipandang masih perlu peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan investasi yang bersifat padat karya kedepannya. (Minggu, 2016)

Penelitian lain tentang kemiskinan juga dilakukan oleh Anton Tri (2016) tentang “Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010”. Penelitian inipun bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, mengetahui tingkatan pengaruh pertumbuhan ekonomi apakah *pro poor* atau anti *poor* serta mengetahui sektor – sektor yang memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Peneliti menggunakan software Eviews 6 dalam menghasilkan output analisis deskriptif sebagai metode analisis sekaligus dengan beberapa pengujian asumsi. Salah satu hasilnya adalah bahwa variabel ketimpangan pendapatan dengan menggunakan data indeks gini

berpengaruh positif terhadap kemiskinan walaupun jika dilihat secara statistik variabel tersebut tidak bersifat signifikan. (Wijayanto, 2016)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, Pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (BPS, 2016)

Sjahroni (2016) dalam bukunya menuliskan, menurut World Bank penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang jumlah pengeluarannya kurang dari 1 dollar per hari. Menurut BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki – laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak – hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki – laki.

Sementara menurut Hagenaars dan vos (1997), kemiskinan berarti secara objektif memiliki lebih sedikit dari kebutuhan minimum absolut yang harus

dipenuhi; kemiskinan adalah memiliki lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain dalam suatu masyarakat; kemiskinan adalah perasaan bahwa tidak memiliki kecukupan untuk dapat terus hidup. (Sjahroni, 2016)

Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki kriteria di negara berkembang disebabkan oleh beberapa factor antara lain : a. perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan ; b. perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan ; c. perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya ; d. perbedaan peranan sector swasta dan negara; e. perbedaan struktur industri.

Ada beberapa indikator kemiskinan yang biasanya digunakan antara lain :

1. Kemiskinan Relatif

Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relative jika pendapatannya berada di bawah pendapatan disekitarnya atau dalam kelompok masyarakat tersebut di lapisan paling bawah meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok namun karena dibandingkan masyarakat disekitarnya pendapatannya dinilai rendah maka orang tersebut termasuk miskin.

2. Kemiskinan Absolut

Dapat diketahui dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, pemukiman, Pendidikan dan kesehatan. Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok maka orang tersebut dikatakan miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini biasanya disebabkan oleh keadaan kultur di masyarakat, serta dapat dikaitkan dengan budaya masyarakat yang menerima kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon pendapat ataupun masukan dari pihak lain yang ingin membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang di sebabkan oleh struktur ataupun system ekonomi yang tidak berpihak kepada yang miskin, sehingga mengakibatkan munculnya masalah – masalah struktur ekonomi yang menyampingkan peranan orang miskin. (Anggriansyah, 2016)

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Sehingga menurut Kuncoro (2006) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu : (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Bagian pertama relatif jelas yaitu biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga – harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. Sedangkan elemen kedua sifatnya lebih subyektif. (Kuncoro, 2006)

Adapun menurut Bank Dunia (2003) ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan yaitu : (Sjahroni, 2016)

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor
4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung
5. Adanya perbedaan sumberdaya dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)
6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampaun seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya
8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good government*)
9. Pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

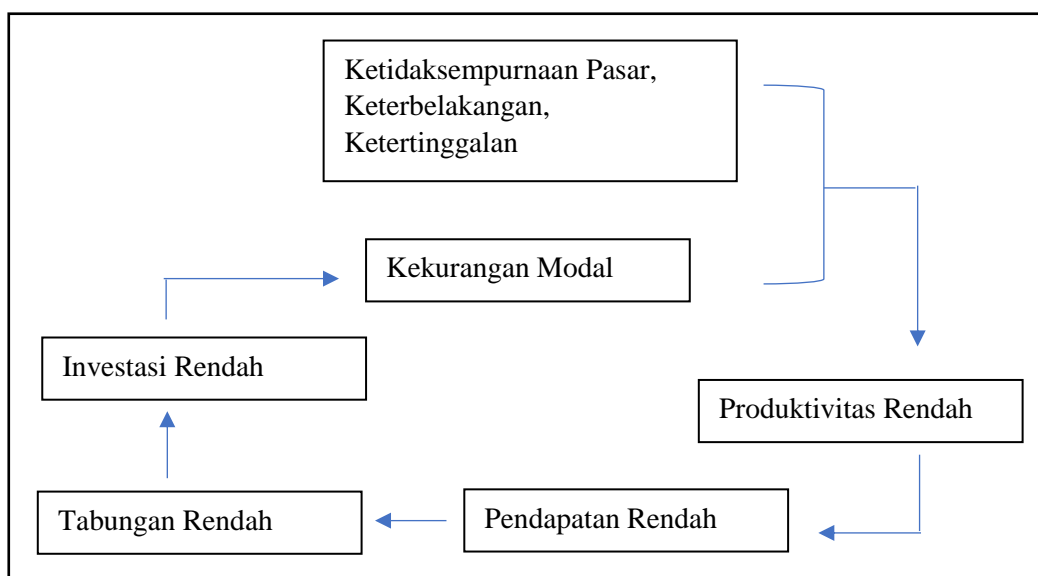
2.2.2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Sharp, et.al (1996: 173-191) dalam buku Kuncoro (2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang

pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan: *“a poor country is poor because it is poor”* (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse



Sumber : Nurske dalam Kuncoro, 2006

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “ Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (*A country is poor because is poor*).

Nurkse juga berpendapat bahwa inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan – keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Pembentukan modal di satu pihak ditentukan oleh tingkat tabungan sedangkan di pihak lain oleh perangsang untuk menanam modal. Kedua faktor ini masih sangat sulit dilaksanakan di Negara Berkembang guna mendapatkan pembentukan tingkat modal yang tinggi. Sehingga, menurut Nurkse, ada dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negara Berkembang dalam mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal dan permintaan modal.

Lingkaran setan kemiskinan dari segi penawaran modal dapat dinyatakan sebagai berikut : Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, sehingga menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada.

Sedangkan Lingkaran setan kemiskinan dari segi permintaan modal memiliki corak dan bentuk yang berbeda di setiap negara. Di negara – negara

miskin, perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah, ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung hingga pada pangkalnya.

2.2.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS mempunyai makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. (Sahdan, 2005). Adapun beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah sebagai berikut :

2.2.3.1. Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang – barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Peningkatan investasi akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja yang produktif sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita termasuk tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. (Mankiw, 2003)

Mankiw (2006) dalam bukunya menjelaskan ada tiga jenis pengeluaran dalam investasi yaitu sebagai berikut :

- a. Investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) yaitu investasi yang mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi.
- b. Investasi Residensial (*residential investment*) merupakan investasi yang mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan rumah untuk disewakan.

- c. Investasi Persediaan (*inventory investment*) adalah investasi yang mencakup barang – barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan – bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

Belanja investasi memainkan peranan yang penting tidak hanya pada pertumbuhan jangka panjang namun juga pada siklus bisnis jangka pendek karena investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi, sebagai besar dari penurunan itu berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. (Mankiw, 2006)

Pengaliran iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang – Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua Undang – Undang ini kemudian dilengkapi dan disempurnakan, dimana UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA disempurnakan dengan UU no. 11 tahun 1970 dan UU no. 6 tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU no. 12 1970. (Prasetyo, 2018)

Adapun tujuan dari penanaman modal seperti yang telah dijelaskan dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional

- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3.1.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Sama halnya seperti kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat 2 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. (Reza Lainatul Rizky, 2016)

Pengaturan tentang kegiatan pananaman modal di Indonesia diatur dalam UU no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 3 ayat 1 huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”

adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup. (Nuraini, 2016)

2.2.3.1.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 9 tentang penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam Undang – Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan – ketentuan Undang – Undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Pengertian modal asing dalam Undang – Undang ini menurut pasal 2 ialah : (Nuraini, 2016)

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia
2. Alat – alat untuk perusahaan, termasuk penemuan – penemuan baru milik orang asing dan bahan – bahn, yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia, selama alat – alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang – Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untk membiayai perusahaan di Indonesia

Adapun modal asing dalam Undang – Undang ini tidak hanya berbentuk Valuta Asing, melainkan meliputi pula alat – alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan – penemuan milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

2.2.3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk mendapatkan akses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM dihitung berdasarkan data – data yang dapat menggambarkan komponen – komponen yang terkait yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka rata – rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang mewakili bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup lebih layak. (BPS, 2017)

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Kotambunan, 2016). Adapun komponen – komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Adapun rumus dalam menghitung Indeks Komponen adalah sebagai berikut :

$$\text{Dimensi Kesehatan : } I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

2. Tingkat Pendidikan

Dalam mengukur dimensi pendidikan penduduk, digunakan dua indikator yaitu Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata – rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata – rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur – umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat tercapai oleh setiap anak.

Dalam perhitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka HLS adalah 18 tahun sedangkan batas minimum adalah 0. Sementara batas maksimum untuk angka RLS adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun

mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

3. Standar Hidup layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan yang lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam hal menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Rata – rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level Kab./Kota. Rata – rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode perhitungan paritas daya beli inipun menggunakan metode Rao.

2.2.3.4. Indeks Gini

Kuncoro (2006) dalam bukunya menyebutkan bahwa indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia (BPS, 1994). Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut : (Kuncoro, 2006)

- a. Tinggi , bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan
- b. Sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingg 17% bagian pendapatan
- c. Rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

Dari semua pengukuran ketimpangan, Indeks Gini adalah yang paling sering dipakai sebagai indikator ketimpangan. Indeks Gini dapat dirumuskan secara konvensional sebagai berikut :

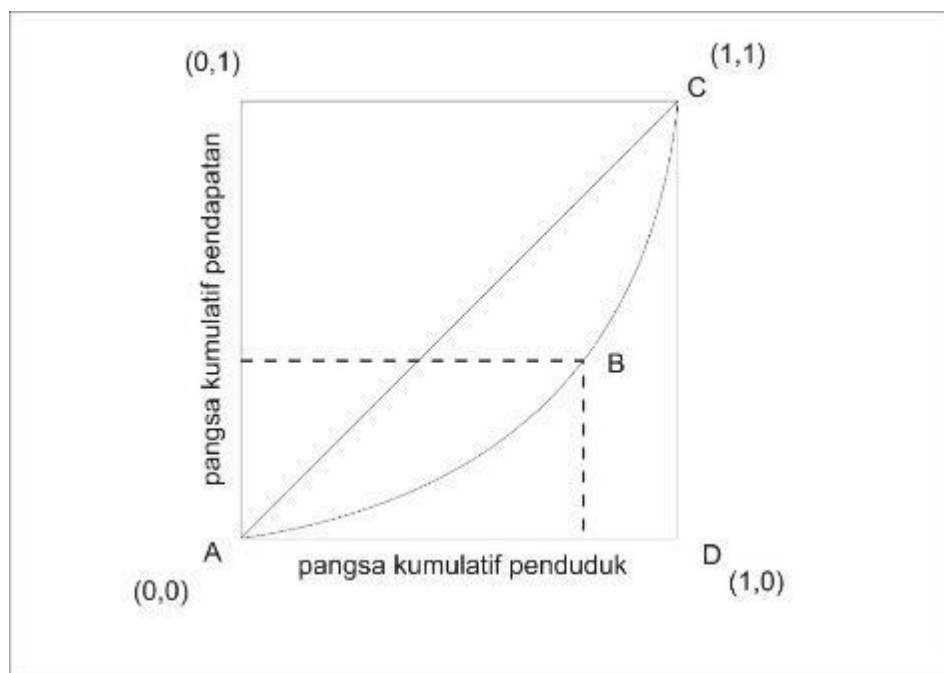
$$G = \sum_{t=1}^{n-1} \mu_t + 1 \pi_t - \sum_{t=1}^{n-1} \mu_t \pi_{t+1}$$

Dimana μ_t adalah pangsa kumulatif pendapatan dan π_t adalah pangsa kumulatif penduduk. Salah satu yang menarik dari Indeks Gini adalah pendekatannya yang sangat langsung terhadap ukuran pemerataan, memuat perbedaan di antara setiap pasangan pendapatan, yang sejauh ini merupakan ukuran ketidakmerataan ekonomi yang paling populer. Pada kenyataannya, pasangan – pasangan yang diobservasi $(\mu_1\pi_1)$, $(\mu_2\pi_2)$, ..., $(\mu_n\pi_n)$ yang dipakai dalam perhitungan Indeks Gini digunakan untuk menghasilkan Kurva Lorenz. Hal ini dilakukan dengan mem-plot pasangan pangsa (kumulatif) pendapatan dan penduduk dalam sebuah kotak.

Adapun nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata untuk seluruh unit masyarakat

(perfect equality), sedang nilai 1 berarti seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu unit saja pada keseluruhan distribusi (perfect inequality). Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai Indeks Gini sebesar 0,4 atau di bawahnya. Ketimpangan yang tinggi apabila mempunyai Indeks Gini di atas 0,4 dalam distribusinya .

Gambar 2.2
Kurva Lorenz



Sumber : Dowling & Valenzuela (2004:202) dalam Kuncoro (2006)

Indeks Gini seringkali ditampilkan bersamaan dengan kurva Lorenz, yang menggambarkan hubungan antara pangsa kumulatif pendapatan dan penduduk. G sebagai Indeks Gini yang diturunkan dari Kurva Lorenz dengan cara membagi daerah yang dibatasi oleh garis diagonal dan kurva Lorenz dengan total daerah pada segitiga yang lebih rendah, yakni :

$$G = \frac{\text{daerah di antara AC dan ABC}}{\text{Seluruh daerah ACD}}$$

Indeks Gini berkisar antara nol dan satu. Bila Indeks Gini sama dengan nol, berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis, ini ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna (garis AC dalam gambar 2.2). Namun, bila indeks gini sama dengan satu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai Indeks Gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Gini berarti semakin merata distribusinya. (Kuncoro, 2006)

2.2.4. Hubungan Antar Variabel Independent dengan Variabel Dependent

2.2.4.1. Hubungan Antara Investasi dengan Kemiskinan

Teddy Desly, dkk (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa nilai investasi yang di dalamnya terdapat angka PMDN dan PMA dianggap memiliki keterkaitan dengan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Walaupun dalam penelitian tingkat investasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, akan tetapi nilai investasi yang ada bersama dengan variabel lain telah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya nilai investasi di suatu daerah, maka akan meningkatkan pula kegiatan perekonomian di daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat.

Sadono Sukirno (2012) pun ikut menjelaskan bahwa kegiatan investasi sangat memungkinkan masyarakat untuk dapat meningkatkan secara terus

menerus kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini didapat dari peranan penting investasi yaitu : a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; b. Kapasitas produksi akan bertambah seiring adanya pertambahan barang modal sebagai akibat adanya investasi; c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. (Minggu, 2016)

2.2.4.2. Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu alat ukur dalam mengetahui kualitas SDM di suatu negara. Ada beberapa komposisi yang berada di dalamnya seperti angka kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan untuk hidup lebih layak yang semuanya dapat menggambarkan kualitas serta pembangunan yang terjadi di negara tersebut. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terkebelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Kotambunan, 2016)

Dalam bukunya Todaro (2005) juga menyebutkan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia sangat dibutuhkan oleh suatu negara karena berkaitan dengan kemampuan negara tersebut dalam menyerap teknologi modern dan dalam pengembangannya. Ini

semua bertujuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.2.4.3. Hubungan Antara Indeks Gini dengan Kemiskinan

Kuncoro (2006) seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa indikator yang sering digunakan dalam mengukur atau mengetahui kesenjangan pendapatan yang terjadi di masyarakat adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Nilai yang ditunjukkan tersebut berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar angka yang ditunjukkan semakin besar pulalah tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Suatu ketimpangan pendapatan dapat dikatakan tinggi jika berada pada angka lebih dari 0,4 dalam distribusi pendapatan masyarakat.

Adapun hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan seperti yang terdapat dalam bukunya Todaro (2005) yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk ternyata mempengaruhi antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan kemiskinan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk cenderung memiliki dampak negatif terhadap penduduk miskin. Hal ini disebabkan karena sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota yang banyak, sehingga kondisi mereka semakin buruk berada pada garis kemiskinan seiring dengan semakin buruknya ketimpangan pendapatan ataupun kesejahteraan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah tibulnya ketidakmerataan pola kepemilikan sumber daya yang pada gilirannya akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. (Todaro, 2005)

2.2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara dan dianggap benar, agar dapat ditarik sebuah konsekuensi logis, maka perlu diadakan sebuah pengujian untuk mengetahui kebenarannya melalui metode – metode pengujian dengan menggunakan data – data hasil dari penelitian. Adapun hipotesis ini digunakan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya dapat mempunyai arah sesuai dengan apa yang sedang diinginkan. Hipotesis – hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 – 2015
2. Diduga Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 – 2015
3. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 – 2015
4. Diduga Indeks Gini berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 – 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang kita peroleh dari sumber kedua dan biasanya data seperti ini sudah siap pakai. Data sekunder seperti ini mudah didapatkan dan tersebar luas diberbagai sumber. Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan sumber – sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini. Data sekunder tersebut yang digunakan sebagai variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk variabel independen adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini, semuanya pada rentang waktu antara tahun 2008 – 2015 di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk memperjelas dalam menganalisis dan memperjelas variabel – variabel yang ada dalam penelitian ini, maka variabel operasional pun dapat dibagi sebagai berikut :

3.2.1. Variabel Independen

Adalah variable yang mempengaruhi atau menjadikan sebuah perubahan terhadap variable dependen. Dalam penelitian ini variable independen yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (x1) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. (Reza Lainatul Rizky, 2016). Yaitu nilai data PMDN di kabupaten/kota di Yogyakarta dari tahun 2008-2015 dalam satuan milyar rupiah. (Bappeda, 2016)
- b. Penanaman Modal Asing (PMA) (x2), merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupaun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Reza Lainatul Rizky, 2016). Yaitu nilai data PMA di Kabupaten/Kota di Yogyakarta dari mulai tahun 2008 – 2015 dalam satuan juta dollar.(BPS, 2017)
- c. Indeks Pembangunan Manusia (x3) merupakan data yang dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf serta rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur capaian pembangunan dalam bidang Pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk

hidup layak. (Widodo, 2011). Data yang diambil dari tahun 2008 hingga tahun 2015 dalam satuan persen. (BPS, 2017)

- d. Indeks Gini (x4) merupakan data yang digunakan sebagai salah satu ukuran umum untuk distribusi suatu pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi yaitu yang memiliki nilai kisaran antara 0 sampai 1. Data diambil dari tingkat indeks gini yang ada di kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta periode tahun 2008 hingga tahun 2015 dalam satuan persen. (BPS,2017)

3.2.2. Variabel Dependen

Adalah variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variable bebas, dalam penelitian ini variable tergantung yang digunakan adalah tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten/kota di daerah Istimewa Yogyakarta.

- a. Tingkat kemiskinan (Y) menurut Badan Pusat Statistika (BPS) adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing – masing Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Garis kemiskinan merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin yang ditentukan dengan dua kriteria yaitu pengeluaran konsumsi perkapita per bulan yang setara dengan 2100 kalori perkapita per hari dan nilai kebutuhan minimum komoditi bukan makanan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di DIY yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2008 hingga 2015 dalam satuan ribu jiwa.

3.3. Metode Analisis Data

Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan alat analisis panel data atau data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data. Data panel adalah data regresi penggabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal, atau tahunan. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Penggabungan kedua jenis data dapat dilihat bahwa variable terikat terdiri dari beberapa daerah (*cross section*) namun dalam berbagai periode waktu (*time series*), runtut waktu yang membahas sekumpulan observasi dalam rentang waktu yang ditentukan (Widarjono, 2009)

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dengan :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

NxT = banyaknya data panel

Menurut (Widarjono, 2009), penggunaan data panel dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* ataupun *time series* yaitu sebagai berikut :

1. Data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.
2. Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan *variable* (*omitted variable*).

Dalam analisis model panel data dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan *Common Effect*, pendekatan *Fixed Effect*, dan pendekatan *Random Effect*. Ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Common Effect Model (CEM)*

Tujuan dari metode ini dengan model regresi *Common Effect* merupakan Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, hanya dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model dapat diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. (Widarjono, 2009). Hasil regresi menunjukkan ketika terjadi kenaikan koefisien secara statistic uji *t* pada alfa 1%, maka keseluruhan menyangkut uji F. Adapun model persamaan regresinya dalam bentuk linier adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel model *fixed effect* menggunakan Teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersept antar variable. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Varibel (LSDV)*. Hasil regresi yang menunjukkan signifikan terhadap variable dummy menunjukkan bahwa intersep antara variable $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$ dapat berbeda. Dengan demikian model fixed effect mampu menjelaskan adanya perbedaan perilaku diatas. Adapun model *Fixed Effect* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{5it} + \beta_6 D_{6it} + \beta_7 D_{7it} + \beta_8 D_{8it} + \dots + e_{it}$$

c. *Random Effect Model (REM)*

Model ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap subjek mempunyai intersep yang berbeda. Namun demikian kita mengasumsikan setiap intersep adalah variable random atau stokastik. Model untuk *random effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_i$$

Dimana :

Y : Kemiskinan, X1 : PMDN, X2 : PMA, X3 : IPM, X4 : Indeks Gini

3.4. Uji Kesesuaian Model Dalam Pengolahan Data

Pemilihan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Beberapa metode uji yang paling baik untuk digunakan adalah sebagai berikut:

3.4.1. Uji *Chow*

Chow test menyebutkan sebagai pengujian F-statistik adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square* atau *Fixed effect*. Sebagaimana yang diketahui bahwa terkadang asumsi bahwa setiap unit cross section memiliki pelaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan setiap cross section memiliki pelaku yang berbeda. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

HO : Model *Pooled Test Square*

HI : Model *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (H0) adalah dengan menggunakan F- Statistik seperti dirumuskan oleh Chow :

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/\left(\frac{n}{k}\right)}$$

Dimana :

RSS1 = Residual Sum Square hasil pendugaan Model *Fixed Effect*

RSS2 = Residual Sum Square hasil pendugaan Model *Common Effect*

n = jumlah data *cross section*

m = jumlah data *time series*

k = jumlah variabel penjelas

Statistic Chow mengikuti distribusi F-Statistik dengan derajat bebas (m,n,k) jika nilai Chow statistic (F-Stat) hasil pengujian lebih besar dari F-Tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang digunakan adalah model *fixed effect*, dan begitupun sebaliknya.

3.4.2. Uji *Hausman*

Hausman test adalah pengujian statistic sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau model *random effect*. Seperti yang diketahui bahwa penggunaan model *fixed effect* mengandung suatu unsur *trade off* yaitu hilangnya derajat bebas dengan memasukkan variable dummy. *Hausman test* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Model *Random effect*

H1 : Model *Fixed effect*

Sebagai dasar penolakan hipotesis nol maka digunaka statistic Hausman dan membandingkannya dengan Chi-Square. Statistic uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi-Square dengan degree of freedom sebanyak k adalah jumlah variable independen. Jika menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistic Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* dan begitu sebaliknya. (Widarjono, 2009)

3.4.3. Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Langrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi random effect ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi Random effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : *common effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-Square dengan degree of freedom sebesar jumlah variable independen. Jika nilai LM statistic lebih besar dari nilai kritis statistic chi – square, maka menunjukkan bahwa menolak hipotesis nol, yang artinya bahwa estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect daripada metode Common Effect dan begitupun sebaliknya. (Widarjono, 2009)

3.5. Pengujian Hipotesis

3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variabel – variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar anatar 0 samapi 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pulalah variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel – variabel independen yang ada. Sebaliknya semakin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel – variabel independen.

Apabila R^2 bernilai 0, maka berarti tidak ada hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin tepat pulalah garis regresi dalam menggambarkan nilai – nilai sebuah observasi.

3.5.2. Uji F

Uji f digunakan dalam mengetahui signifikan atau tidak signifikannya antara variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama – sama). Uji f ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel – variabel independen yang ada secara bersama – sama terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, berarti variabel – variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Menentukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F (Sig-F)
3. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5%
4. Rumus atau uji yang digunakan

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana : n = jumlah observasi ; k = jumlah parameter termasuk intersep

5. Kriteria pengujian :
 - a. Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

- b. Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka gagal menolak H_0 , artinya bahwa variabel independen secara bersama – sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.5.3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu variabel tersebut. Adapun Hipotesis uji t adalah sebagai berikut :

1. Jika hipotesis signifikan positif
 - a. $H_0 : \beta_i = 0$
 - b. $H_1 : \beta_i > 0$
2. Jika hipotesis signifikan negatif
 - a. $H_0 : \beta_i = 0$
 - b. $H_1 : \beta_i < 0$
3. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5%
4. Rumus atau uji yang digunakan

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_1}{se(\beta_1)}$$

5. Kriteria pengujian :
 - a. Jika nilai t hitung (t statistik) $> t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan
 - b. Jika nilai t hitung (t statistik) $< t \text{ tabel}$, maka gagal menolak H_0 , artinya bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sekilas Tentang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau **Ngayogyakarta** (bahasa Jawa) merupakan nama yang diberikan oleh Paku Buwono II (Raja Mataram tahun 1719 -1727) menggantikan nama Pesanggrahan Gartitawati. Nama Yogyakarta yang berarti Yogya yang Kerta atau Yogya yang makmur juga sering disebut dengan *Ngayogyakarta Hadiningrat* yang berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Adapun sumber lain ada yang mengatakan bahwa nama Yogyakarta diambil dari nama ibu kota *Sanskrit Ayodhya* dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari – hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa jawa). Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah berdiri sejak tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang nantinya bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Sedangkan Kadipaten Pakualaman, didirikan oleh Pangeran Notokusumo sejak tahun 1813 yang kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. (Dinas Pendidikan, 2018)

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara legal formal berdasarkan UU No. 3 Tahun 1950, yang mengatur tentang wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD serta macam kewenangannya. Kemudian adanya revisi yang berisi tentang penambahan wewenang melalui UU No. 19 Tahun 1950. DIY mendapatkan status sebagai provinsi di Indonesia baru pada tahun 1965. Adapun dasar filosofi pembangunan DIY adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita – cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat

Yogyakarta yang berdasarkan pada nilai – nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. (Putra, 2013)

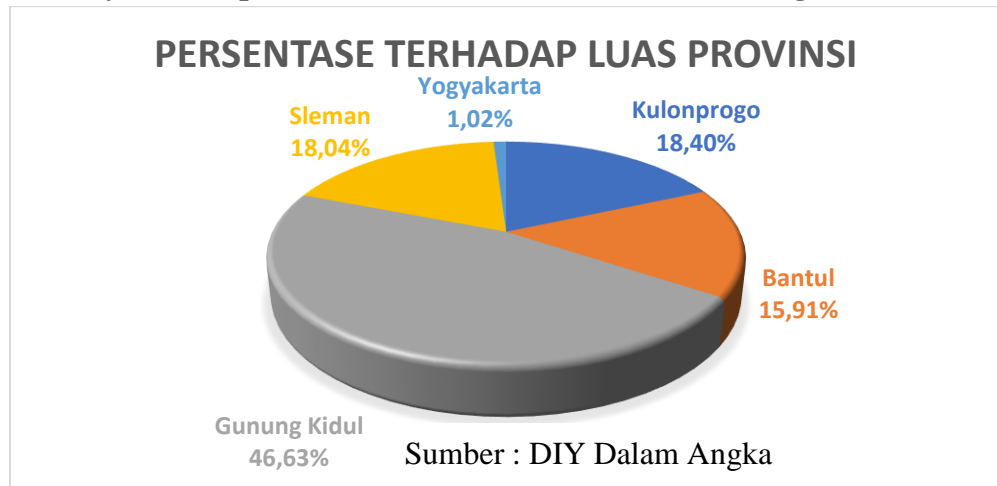
4.1.2. Keadaan Geografis dan Demografis

Terletak di antara 7⁰33' Lintang Utara dan 8⁰12' Lintang Selatan serta 110⁰00'dan 110⁰50' Bujur Timur, Provinsi DIY memiliki luas wilayah sebesar 3185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia yaitu 1.860.359,67 km². Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Samudera Indonesia di sebelah Selatan

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi dalam 4 kabupaten dan 1 kota dengan 78 kecamatan serta 438 Desa/Kelurahan memiliki luas wilayah seperti yang ada dalam laporan DIY dalam angka tahun 2016 adalah sebesar 3185,80 km² atau sekitar 0,17% dari luas Indonesia. Adapun Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY lainnya yaitu sebesar 1.485,36 km² atau 46,63% dari luas Provinsi DIY, sedangkan Kota Yogyakarta adalah wilayah terkecil di seluruh luas wilayah Provinsi DIY dengan luas 32,50 km² atau sekitar 1,02% dari luas Provinsi DIY. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 4.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi DIY (DIY dalam angka 2016)



Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 3.679.179 jiwa. Adapun jumlah penduduk laki – laki sebesar 49,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 50,57 persen, dengan 66,74 persen penduduk kota dan 33,26 persen penduduk desa menurut hasil proyeksi penduduk SP2010 back casting. Namun jika dilihat dari segi kepadatan penduduk dengan luas wilayah sebesar 3.185,80 km² tercatat di DIY sebesar 1.155 jiwa per km². Yaitu dengan rincian bahwa kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta dengan 12.699 jiwa per km² yang memiliki luas wilayah hanya sekitar 1% dari luas Provinsi DIY. Berbalik keadaan dengan daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan wilayah terluas di DIY yaitu mencapai 46,63 persen, memiliki kepadatan penduduk terendah yang hanya dihuni rata – rata 482 jiwa per km² nya. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini : (BPS, 2016)

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten / Kota Provinsi DIY Tahun 2015

Kabupaten / Kota	Luas Km2	Jumlah	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan
			(Orang/Km2)	Penduduk 2010(%)
Kulonprogo	586,27	412.198,00	703,00	1,12
Bantul	506,85	971.511,00	1.917,00	1,32
Gunung Kidul	1.485,36	715.282,00	482,00	1,09
Sleman	574,82	1.167.481,00	2.031,00	1,13
Kota Yogyakarta	32,50	412.704,00	12.699,00	1,27
DIY	3.185,80	3.679.176,00	1.155,00	1,19

4.2. Deskripsi Data Penelitian

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama 8 tahun yaitu dari tahun 2008 – 2015 yang merupakan data dari lima Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui apakah variabel – variabel independen (penjelas) berpengaruh terhadap variabel dependen (yang dijelaskan).

Data – data yang termasuk variabel dependen (yang dijelaskan) yaitu Kemiskinan yang terdapat di lima Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini pun diperoleh dari buku publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam judul “ DIY Dalam Angka “ dari berbagai edisi yang dinyatakan dalam satuan Ribu Jiwa selama kurun waktu dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Sedangkan yang termasuk dalam variabel independen (penjelas) yaitu terdiri dari jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Gini, dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data inipun juga diperoleh dari buku publikasi “DIY Dalam Angka” dari berbagai edisi dengan satuan masing – masing serta dari website resmi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama kurun waktu dari tahun 2008 hingga tahun 2015.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah berupa program *Econometric E-Views (eviews) 9* yang telah ter-*instal* dan dapat digunakan dengan semestinya. Penelitian inipun menggunakan analisis secara ekonometrik.

4.3. Deskripsi Objek Data Penelitian

4.3.1. Perkembangan Kemiskinan

Kemiskinan memang merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap negara. Tak menentu apakah negara tersebut termasuk kedalam negara maju maupaun berkembang, masalah kemiskinan selalu ada dan seakan menjadi momok tersendiri yang terus dicarikan solusi penanggulangannya. Pemerintah negara mauapun daerah sebagai tonggak penentu kebijakan tentunya selalu berusaha dalam meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi di tengah – tengah masyarakat. Berikut data tentang kemiskinan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY selama kurun waktu tahun 2008 – 2015 :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
tahun 2005 – 2015 (ribu jiwa)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	97,9	164,3	173,5	125,1	48,1
2009	89,9	158,5	163,7	117,5	45,3
2010	90,0	146,9	148,7	117,0	37,8
2011	92,8	159,4	157,1	117,3	37,7
2012	92,4	158,8	156,5	116,8	37,6
2013	86,5	156,6	152,2	110,8	35,6
2014	84,7	153,5	148,4	110,4	36,6
2015	88,1	160,2	155,0	111,0	36,0

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika dilihat berdasarkan tabel di atas (tabel 4.2), menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY bersifat fluktuatif. Jumlah penduduk miskin terbesar terjadi di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2008 yaitu sebesar 173,5 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terjadi di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 35,6 ribu jiwa di tahun 2013. Memang angka yang ditunjukkan di setiap Kabupaten/Kota di DIY berfluktuatif, namun tingkat kemiskinan di DIY masih bersifat tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain khususnya provinsi yang berada di Pulau Jawa.

4.3.2. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat 2 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. (Reza Lainatul Rizky, 2016) Berikut data

mengenai jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2008 – 2015 :

Tabel 4.3
Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di D.I Yogyakarta
tahun 2008 – 2015 (milyar rupiah)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	28,56	86,95	19,59	926,86	744,47
2009	28,56	96,95	29,07	983,46	744,47
2010	34,02	96,95	35,44	962,34	756,18
2011	34,02	189,26	35,50	1218,96	835,41
2012	34,02	191,26	35,50	1242,03	1303,13
2013	34,02	241,02	35,50	1242,24	1311,87
2014	378,47	253,29	35,50	1349,72	1551,56
2015	494,70	268,01	35,50	1431,04	1722,41

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat kita lihat bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terjadi di Kabupaten/Kota di DIY cenderung selalu mengalami peningkatan. Bahkan jika kita lihat jumlah PMDN yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014 dan 2015, mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun – tahun sebelumnya yaitu dari sebesar 34,02 milyar rupiah di tahun 2013 menjadi sebesar 378,47 dan 494,70 milyar rupiah di tahun 2014 dan 2015. Adapun PMDN terendah yang terjadi selama kurun waktu tahun 2008 – 2015 adalah di Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah investasi sebesar 19,59 milyar rupiah di tahun 2008. Sedangkan yang tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta dengan jumlah investasi sebesar 1722,41 milyar rupiah di tahun 2015 yang mana telah diketahui melalui data sebelumnya bahwa Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk miskin terendah di tahun 2013 dengan kurun waktu yang sama.

4.3.3. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 9 tentang penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berikut data mengenai jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2008 – 2015 :

Tabel 4.4
Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di D.I Yogyakarta tahun
2008 – 2015 (juta dollar)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	0,14	10,30	1,71	38,71	110,72
2009	0,39	12,75	1,71	38,71	111,07
2010	0,32	16,36	1,71	36,72	111,18
2011	0,32	21,00	10,37	244,03	180,98
2012	0,34	24,91	10,70	252,91	183,37
2013	0,29	21,65	9,22	260,25	206,40
2014	41,97	21,04	10,40	243,31	184,70
2015	42,00	25,63	10,16	224,74	240,46

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika kita melihat tabel 4.4 di atas, jumlah PMA yang ada di Kabupaten/Kota di DIY menunjukkan angka yang fluktuatif. Berbeda dengan jumlah PMDN yang telah disebutkan sebelumnya yang cenderung meningkat dari tahun – ke tahun. Sedikit berbeda pada jumlah PMA di Kabupaten/Kota di DIY periode tahun 2008 – 2015 yaitu angka terendah terdapat pada Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah PMA sebesar 0,14 juta dollar di tahun 2008. Sedangkan angka tertinggi terdapat di Kabupaten Sleman dengan angka 260,25 juta dollar di tahun 2013 yang mana pada

periode yang sama angka PMDN terbesar berada di Kota Yogyakarta pada tahun 2015.

4.3.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan pada masyarakat. kualitas sumber daya ini biasanya di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dengan melihat tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, pendidikan (jumlah masyarakat yang buta huruf), dan kesehatan. Rendahnya produktivitas penduduk tersebut dapat menciptakan rendahnya perolehan pendapatan penduduk. Dalam suatu daerah, jika pertumbuhan pendapatan masyarakatnya rendah, maka tidak jarang akan menyebabkan tingginya penduduk miskin didaerah tersebut (Wati, 2015). Berikut data perkembangan nilai Indeks Pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2008 – 2015 :

Tabel 4.5
Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota
Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2008 – 2015 (persen)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	73,26	73,38	70,00	77,24	78,95
2009	73,77	73,75	70,18	77,70	79,29
2010	68,83	75,31	64,20	79,69	82,72
2011	69,53	75,79	64,83	80,04	82,98
2012	69,74	76,13	65,69	80,10	83,29
2013	70,14	76,78	66,31	80,26	83,61
2014	70,68	77,11	67,03	80,73	83,78
2015	71,52	77,99	67,41	81,20	84,56

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di DIY selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Memang pada tahun 2010 angka cenderung turun, hal ini disebabkan karena adanya perubahan metode baru perhitungan IPM yang dikeluarkan oleh pihak BPS. Adapun angka terendah masih terdapat pada Kabupaten Gunung Kidul dengan angka 64,20 persen di tahun 2010. Sedangkan angka tertinggi berada pada Kota Yogyakarta sebesar 84,56 persen di tahun 2015. Kabupaten Gunung Kidul dengan berbagai keterbatasannya memang memerlukan perhatian khusus dalam menangani permasalahan ekonomi disana.

4.3.5. Perkembangan Indeks Gini

Kuncoro (2006) dalam bukunya menyebutkan bahwa indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia (BPS, 1994). Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah (Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, 2006). Berikut data perkembangan nilai Indeks Gini yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2008 – 2015 :

Tabel 4.6
Persentase Indeks Gini di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta
tahun 2008 – 2015 (persen)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	0,29	0,32	0,25	0,31	0,18
2009	0,25	0,25	0,24	0,29	0,23
2010	0,24	0,27	0,25	0,28	0,22
2011	0,39	0,38	0,34	0,42	0,38
2012	0,42	0,41	0,36	0,47	0,37
2013	0,31	0,33	0,24	0,39	0,44
2014	0,38	0,32	0,29	0,41	0,40
2015	0,37	0,38	0,32	0,45	0,44

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, menunjukkan bahwa nilai Indeks Gini di Kabupaten/Kota di DIY selalu berfluktuatif. Adapun angka tertinggi berada pada Kabupaten Sleman dengan angka sebesar 0,47 persen di tahun 2012. Kita ketahui bahwa Indeks Gini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat. Nilai IG yang melebihi 0,4 persen mengindikasikan bahwa ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut tergolong tinggi dan ini terjadi di beberapa tahun dan Kabupaten maupun Kota di DIY selama kurun waktu antara tahun 2008 - 2015. Sedangkan angka terendah adalah sebesar 0,24 persen yang terdapat di dua Kabupaten yaitu Kulonprogo di tahun 2010 dan Gunung Kidul di tahun 2009 dan 2013.

4.4. Hasil Analisis Regresi

Adapun tujuan dari regresi ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X1), Penanaman Modal Asing (PMA) (X2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3), serta Indeks Gini

(X4) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) di daerah Provinsi DIY dengan model data panel.

Pemodelan dengan menggunakan regresi data panel tersebut dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metode dalam pengolahannya. Pendekatan – pendekatan tersebut antara lain : *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Berikut pengaplikasian serta penjabaran dari ketiga pendekatan metode yang telah disebutkan tersebut.

4.4.1. Pemilihan Model Data Panel

4.4.1.1. Uji Chow

Metode ini digunakan untuk membandingkan model yang terbaik antar dua model yaitu *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan cara membandingkan nilai hasil probabilitasnya dengan nilai alfa. Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dari hasil regresi yang telah dilakukan dalam membandingkan antara dua model CEM dengan FEM diperoleh hasil probabilitas sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Regresi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2656.603092	(4,191)	0.0000
Cross-section Chi-square	807.327789	4	0.0000

Sumber : Hasil olah data pada *Eviews 9*

Berdasarkan hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas F test sebesar $0.0000 < 0.05$ yang artinya menolak H_0 atau menerima H_a , sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam uji regresi panel ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

4.4.1.2. Uji *Hausman*

Metode ini digunakan untuk membandingkan model terbaik antara dua model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM) dengan cara membandingkan nilai hasil probabilitasnya dengan nilai alfa. Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_a : *Fixed Effet Model* (FEM)

Dari hasil regresi yang telah dilakukan dalam membandingkan antara dua model REM dengan FEM diperoleh hasil probabilitas sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Regresi Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10626.412370	4	0.0000

Sumber : hasil olah data pada *Eviews 9*

Berdasarkan hasil uji *Hausman* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F – statistik sebesar $0.0000 < 0.05$ yang artinya menolak H_0 atau menerima H_a , sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam uji regresi panel ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.4.1.3. Estimasi Fixed Effect Model

Model *Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu data diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9
Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/28/18 Time: 19:23				
Sample: 2008 2015				
Included observations: 40				
Cross-sections included: 5				
Total pool (balanced) observations: 200				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.80104	16.71258	3.279030	0.0012
X1?	-0.010324	0.002602	-3.967958	0.0001
X2?	-0.034503	0.009923	-3.477126	0.0006
X3?	0.824163	0.225578	3.653559	0.0003
X4?	9.568741	7.541996	1.268728	0.2061
Fixed Effects (Cross)				
_BNT--C	39.33677			
_GK--C	44.73520			
_KLP--C	-24.39247			
_KY--C	-69.24399			
_SLM--C	9.564488			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.989412	Mean dependent var		111.9028
Adjusted R-squared	0.988969	S.D. dependent var		44.76499
S.E. of regression	4.701630	Akaike info criterion		5.977652
Sum squared resid	4222.117	Schwarz criterion		6.126076
Log likelihood	-588.7652	Hannan-Quinn criter.		6.037717
F-statistic	2231.108	Durbin-Watson stat		1.783620
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$Y_{it} = 54.80104 - 0.010324 X1_{it} - 0.034503 X2_{it} + 0.824163 X3_{it} + 9.568741 X4_{it}$$

Keterangan :

- Y = Jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- BO = Koefisien Intersep
- X1 = Koefisien pengaruh x1 (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY (Milyar Rupiah)
- X2 = Koefisien pengaruh X2 (Penanaman Modal Asing (PMA)) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY (Juta dollar)
- X3 = Koefisien pengaruh X3 (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY (Persen)
- X4 = Koefisien pengaruh X4 (Indeks Gini) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY (Persen)

4.4.1.4. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 yang dihasilkan dari estimasi dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan hasil sebesar 0.989412 yang menunjukkan bahwa variasi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variabel – variabel independent yang ada yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini sebesar 98,94 % dan sisanya yaitu sebesar 1,06% dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar variabel model yang digunakan.

4.4.1.5. Uji F

Uji F dilakukan adalah untuk mengetahui apakah variabel – variabel independen secara bersama – sama telah dapat mempengaruhi variabel dependen

yang ada atau tidak. Pada estimasi kali ini nilai F hitung menunjukkan angka sebesar 2231.108 dengan nilai probabilitas F hitung sebesar 0.000000. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa dengan $\alpha = 5\%$, F hitung menolak H_0 yang berarti secara estimasi *Fixed Effect Model* (FEM), variabel – variabel independen yang digunakan yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Indeks Gini secara bersama – sama telah mempengaruhi variabel dependen yang ada yaitu jumlah penduduk miskin di DIY secara signifikan.

4.4.1.6. Uji t

Uji t adalah digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dari hasil estimasi di dapatkan bahwa :

1. Variabel X1 (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))

Dari hasil estimasi didapatkan nilai probabilitas X1 sebesar 0.0001 yang menunjukkan bahwa probabilitas X1 lebih kecil daripada alfa 1% ($0.0001 < 0,01$). Sehingga memberikan hasil menolak H_0 yang berarti bahwa variabel X1 (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

2. Variabel X2 (Penanaman Modal Asing (PMA))

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan mendapatkan hasil nilai probabilitas X2 sebesar 0.0006 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas X2 lebih kecil daripada alfa 1% ($0.0006 < 0,01$). Sehingga

memberikan hasil menolak H_0 yang berarti bahwa variabel X2 (PMA) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

3. Variabel X3 (Indeks Pembangunan Manusia)

Dari hasil estimasi menunjukkan nilai hasil probabilitas X3 sebesar 0.003 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas X3 lebih kecil daripada alfa 1% ($0.0003 < 0,01$). Maka memberikan hasil menolak H_0 yang berarti bahwa variabel X3 (IPM) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

4. Variabel X4 (Indeks Gini)

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan menunjukkan hasil nilai probabilitas X4 sebesar 0.2061 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas X4 lebih besar daripada alfa 10% ($0.2061 > 0,1$). Sehingga memberikan hasil gagal menolak H_0 yang berarti bahwa variabel X4 (Indeks Gini) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Kemiskinan).

4.4.1.7. Analisis Kabupaten

Tabel 4.10
Hasil Analisis Kabupaten

Fixed Effects (Cross)	
_BNT--C	39.33677
_GK--C	44.73520
_KLP--C	-24.39247
_KY--C	-69.24399
_SLM--C	9.564488

Tabel 4.11
Perhitungan Konstanta Perkabupaten

Kabupaten/kota	Intersep	Koefisien	Nilai
Bantul	39,33677	54,80104	94,13781
Gunung Kidul	44,73520	54,80104	99,53624
Kulonprogo	-24,39247	54,80104	30,40857
Kota Yogyakarta	-69,24399	54,80104	-14,44295
Sleman	9,56449	54,80104	64,36553

Sehingga dari hasil nilai di atas dapat diketahui bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) mampu menjelaskan perbedaan perilaku di setiap kabupaten / kota di Provinsi DIY melalui hasil nilai Intersep yang berbeda – beda.

4.5. Interpretasi Hasil

Dalam hal ini menjelaskan hubungan masing – masing variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel dependen (Y), dilihat dari setiap nilai koefisiennya. Adapun dari hasil estimasi yang telah dilakukan adalah :

1. Koefisien Variabel X1 (PMDN)

Koefisien variabel X1 menunjukkan hasil sebesar = -0.010324 dengan probabilitas uji t 0.0001 yang berarti signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan). Dengan nilai -0.010324 artinya adalah bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan signifikan. Yaitu setiap kenaikan Rp 1 Milyar PMDN akan berdampak pada menurunnya jumlah penduduk miskin sebesar 0.010324 ribu jiwa atau 10,32 jiwa. Hal inipun juga berlaku pada kebalikannya yaitu apabila

terjadi penurunan sebesar Rp 1 Milyar PMDN akan menaikkan jumlah penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10,32 jiwa.

2. Koefisien Variabel X2 (PMA)

Koefisien variabel X2 menunjukkan hasil sebesar $= -0.034503$ dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0.0006 yang berarti signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan). Dengan nilai -0.034503 artinya adalah bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen yang ada. Yaitu setiap kenaikan atau pertambahan 1 juta Dollar PMA Provinsi DIY akan berdampak pada menurunnya jumlah penduduk miskin sebesar 0.034503 ribu jiwa atau sebesar 34,50 jiwa. Hal inipun juga berlaku pada kebalikannya yaitu apabila terjadi penurunan 1 juta Dollar PMA DIY akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 34,50 jiwa penduduk DIY.

3. Koefisien Variabel X3 (IPM)

Koefisien variabel X3 menunjukkan hasil sebesar $= 0.824163$ dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0.0003 yang berarti signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan) pada alfa 1%. Dengan nilai 0.824163 artinya adalah bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yang ada. Yaitu setiap kenaikan 1 persen IPM penduduk DIY akan berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin sebesar 0.824163 ribu jiwa atau sebesar 824,16 jiwa. Hal inipun juga berlaku pada kebalikannya yaitu apabila terjadi penurunan setiap 1

persen IPM penduduk DIY akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 824,16 jiwa penduduk DIY.

4. Koefisien Variabel X4 (Indeks Gini)

Koefisien variabel X4 menunjukkan hasil sebesar = 9.568741 dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0.2061 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (kemiskinan) pada alfa 1%. Walaupun tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang ada, namun Indeks Gini yang berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin telah sesuai dengan teori yang ada. Mencoba menyambung dari hasil yang ditunjukkan dengan nilai 9.568741 artinya adalah setiap kenaikan 1 persen Indeks Gini penduduk DIY akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 9.568741 ribu jiwa atau sebesar 9,568.74 jiwa. Hal inipun juga berlaku pada kebalikannya yaitu apabila terjadi penurunan setiap 1 persen Indeks Gini penduduk DIY akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,568.74 jiwa penduduk DIY.

4.6. Analisis Ekonomi

4.6.1. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan dari nilai probabilitas t-statistik PMDN terhadap kemiskinan menunjukkan hasil sebesar 0.0001, maka PMDN berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan karena nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari alfa 1% ($0.0001 < 0.05$). sehingga secara statistik variabel PMDN (X1) telah dapat

berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). Adapun koefisien yang dihasilkan oleh variabel PMDN (X1) adalah sebesar -0.010324 yang berarti bahwa setiap kenaikan Rp 1 Milyar jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri akan menurunkan jumlah penduduk miskin DIY sebesar 0.010324 ribu jiwa setiap tahunnya.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan bahwa PMDN akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang ada. Hal inipun sejalan sesuai dengan penelitian dari (Priyanto, 2018) yang meneliti pengaruh investasi PMA dan PMDN terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Yaitu dengan hasil bahwa adanya pengaruh negatif tidak langsung dan signifikan antara variabel PMDN dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Adanya pengaruh tidak langsung tersebut mungkin dapat dijelaskan melalui penelitian (Momongan, 2013) yang meneliti adanya pengaruh keterkaitan antara nilai investasi PMA dan PMDN, perkembangan PDRB, dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel investasi dapat memiliki pengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan. Artinya adalah dengan meningkatnya investasi di suatu daerah maka akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Nilai investasi yang termasuk di dalamnya nilai PMDN maupun PMA dapat menurunkan jumlah penduduk miskin jika variabel tersebut terus ditingkatkan. Hal ini karena dengan meningkatnya jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan bertambah pulalah jumlah PDRB yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pendapatan yang berlebih itulah yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan sektor – sektor ekonomi yang dibutuhkan. Seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan UMKM, atau peningkatan kesempatan lapangan kerja baru seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian di atas. Namun, investasi dapat memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin jika investasi yang ada hanya bersifat padat modal dan dinikmati oleh golongan tertentu saja. Hal ini yang juga ditunjukkan melalui penelitian dari (Febriaty, 2017) yang menghasilkan penelitian bahwa variabel investasi akan berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan masyarakat jika proses investasi yang dilakukan juga tidak memiliki peran terhadap perekonomian masyarakat secara luas. Dalam artian bahwa hasil investasi hanya dapat dinikmati oleh para investor dan kalangan menengah atas saja.

Rata – rata penduduk miskin yang masih kesusahan dalam mendapatkan pekerjaan ataupun penduduk dengan penghasilan yang masih rendah akan sangat terbantu dengan meningkatnya Penanaman Modal yang ada jika hal tersebut dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Karena dengan faktor tersebut akan semakin mempermudah penduduk miskin dalam mendapatkan akses ke sektor – sektor ekonomi yang dibutuhkan dan pada gilirannya dapat menekan jumlah penduduk miskin khususnya yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.6.2. Analisis Pengaruh Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan nilai probabilitas t-statistik PMA terhadap kemiskinan menunjukkan hasil sebesar 0.0006, maka PMA berpengaruh signifikan terhadap

variabel kemiskinan pada alfa 1% karena nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari alfa 1% ($0.0006 < 0.01$). sehingga secara statistik variabel PMA (X2) telah dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y). Adapun koefisien yang dihasilkan oleh variabel PMA (X2) adalah sebesar -0.034503 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta Dollar PMA DIY akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0.034503 ribu jiwa setiap tahunnya.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan bahwa PMA akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang ada di DIY. Masih sejalan dengan PMDN yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa hasil inipun memiliki kesimpulan yang sama pula dari penelitian (Priyanto, 2018) dan juga (Momongan, 2013) yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) ke suatu daerah akan berdampak meningkatnya pendapatan daerah melalui PDRB yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan pembangunan daerah tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur maupun pembukaan banyak kesempatan kerja baru. Dengan banyaknya tenaga kerja yang akan diserap melalui proyek – proyek baru PMA nantinya akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pertumbuhan serta pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan terwujudnya pembangunan ekonomi tersebutlah akan berpengaruh terhadap turunnya tingkat kemiskinan yang ada.

Tentunya Pemerintah DIY dalam hal ini perlu juga memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan investasi yang ada di Provinsi tersebut. Agar tingkat investasi yang ada dapat memberikan dampak yang cukup signifikan

terhadap pembangunan ekonomi di masyarakat secara luas. Mengingat masih tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY.

4.6.3. Analisis Pengaruh Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan nilai probabilitas t-statistik IPM terhadap kemiskinan menunjukkan hasil sebesar 0.0003, maka IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada alfa 1% karena nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari alfa 1% ($0.0003 < 0.1$). Sehingga secara statistik variabel IPM (X3) telah dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). Adapun koefisien yang dihasilkan oleh variabel IPM (X3) adalah sebesar 0.824163 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen IPM setiap tahunnya akan menaikkan pula jumlah penduduk miskin sebesar 0.824163 ribu jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil tersebut tentunya tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan di awal yang menyatakan bahwa variabel IPM akan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di DIY. Hal inipun tentunya juga tidak sesuai dengan jurnal penelitian dari (Kotambunan, 2016) dan juga (Suliswanto, 2010) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005 – 2014 dan juga di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2006 – 2008 yang menyatakan bahwa adanya korelasi atau hubungan negatif secara signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan yang ada. Artinya adalah bahwa jika nilai IPM terjadi kenaikan, maka jumlah penduduk miskin di suatu daerah akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Tentunya dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran hasil program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Namun dengan adanya nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0003 menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di DIY. Dengan nilai koefisien sebesar 0.824163 menunjukkan bahwa seakan dengan adanya kenaikan 1% IPM maka akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.824163 jiwa. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan teori pembangunan yang ada. Dimana jika terjadi peningkatan pembangunan, maka seharusnya jumlah penduduk miskin dapat berkurang dengan adanya peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan tersebut.

Melalui penelitian dari (Wati, 2015) mungkin sesuatu yang bertolak belakang tersebut dapat dijelaskan. Dalam hasilnya peneliti menyebutkan bahwa IPM yang berpengaruh positif tersebut dapat terjadi karena adanya program pembangunan pemerintah yang menyangkut tiga indikator IPM seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat masih kurang optimal. Belum optimalnya program pembangunan yang mencakup 3 indikator tersebut dapat dirasakan dengan belum banyaknya program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi para penduduk miskin.

Jika kita melihat kondisi Provinsi DIY yang seakan menunjukkan kondisi masyarakat yang “miskin tetapi sejahtera” ini, mungkin hal tersebut dapat

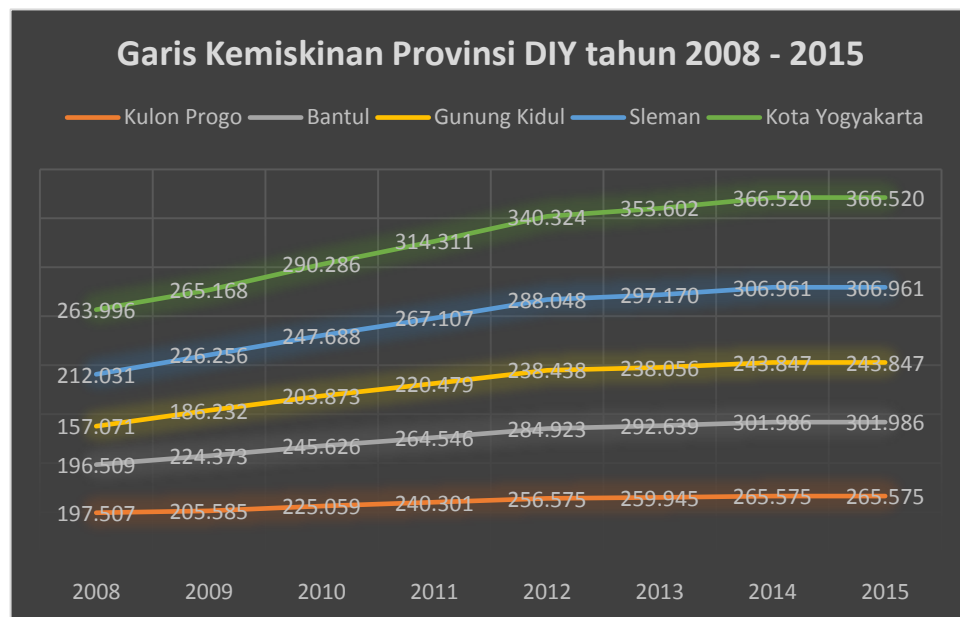
dijelaskan. Dalam sektor pendidikan misalnya, Provinsi DIY telah didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian yang memang keduanya tidak begitu memerlukan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (Niswati, 2014). Seperti dikutip dalam berita Tribun Jogja yang menyatakan bahwa ada sedikitnya terdapat 6.721 pengangguran di kota Yogyakarta pada tahun 2017 ini. Memang belum ada pendataan pengangguran berdasarkan pendidikan, namun hal tersebut dapat dilihat dari data para pencari kerja yang mayoritas berasal dari Lulusan SMA sebesar 45,79 persen, 36,28 persen lulusan sarjana, 11,21 persen lulusan diploma dan 6,72 persen untuk lainnya (tribunnews, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan di DIY ternyata tidak menjamin meningkatnya kesejahteraan hidup seseorang.

Belum lagi jika kita melihat tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi DIY yang menunjukkan angka sebesar 0,425 persen. Angka ini merupakan angka ketimpangan tertinggi di Indonesia pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka ketimpangan yang terjadi di Provinsi DIY. Hasil riset dari Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta menemukan bahwa tingginya angka ketimpangan di DIY ditandai oleh adanya problem penguasaan aset produktif, yakni lahan pertanian. Jika kita melihat kondisi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta (Gamping, Mlati, dan Depok di Kabupaten Sleman serta Banguntapan, Sewon, dan Kasihan di Kabupaten Bantul) menyumbang alih fungsi lahan sebesar 79,15 ha pertahun atau 73,28% dari alih fungsi lahan pertanian rata – rata pertahun di seluruh DIY. Berkenaan dengan penguasaan lahan, rata – rata Rumah Tangga

pertanian DIY hanya menguasai 2.802 m2. Keterbatasan aset lahan pertanian yang telah menopang hidup bagian terbesar penduduk DIY inilah yang kemudian mendorong masyarakat pedesaan beralih pada sektor – sektor informal sebagai sumber penghidupan. Sehingga menimbulkan masih kurangnya aktivitas dalam mendorong tumbuhnya perekonomian di pedesaan. (Sutaryono, 2018)

Sedangkan jika kita melihat dari besarnya garis kemiskinan yang ada di Provinsi DIY dengan adanya kenaikan secara terus menerus pada variabel IPM, maka keadaan inipun dapat dijelaskan. Berikut Garis Kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2008 – 2015 :

Tabel 4.12
Garis Kemiskinan Provinsi DIY tahun 2008 - 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa semakin meningkatnya nilai Garis Kemiskinan menunjukkan semakin baiklah kualitas penduduk di daerah tersebut. Akan tetapi dalam hal ini penduduk provinsi DIY relatif terkonsentrasi pada kuantil

pengeluaran menengah ke bawah seperti yang disebutkan dalam laporan Bappeda DIY tentang analisis ketimpangan pengeluaran penduduk (Indeks Gini) di DIY (BAPPEDA, 2017). Hal ini menunjukkan semakin meningkat kualitas penduduk daerah Provinsi DIY, ternyata semakin menambah pula tingkat kemiskinan yang ada. Yaitu yang disebabkan karena masih banyaknya penduduk yang berada pada batas bawah dari garis kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya.

Kenaikan IPM seharusnya dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY. Pemerintah sekiranya perlu memperhatikan fenomena – fenomena yang terjadi dalam hal ini. Sehingga dengan adanya program – program peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia yang ada, dapat dibarengi dengan semakin terbukanya akses masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya. Karena dengan semakin tingginya produktivitas seseorang, maka sesungguhnya dapat lebih mudah untuk keluar dari jurang kemiskinan.

4.6.4. Analisis Pengaruh Variabel Indeks Gini Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan nilai probabilitas t-statistik Indeks Gini terhadap kemiskinan menunjukkan hasil sebesar 0.2061, maka Indeks Gini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan yang ada karena nilai probabilitas t-statistik yang besar dari alfa 10% ($0.2061 > 0.1$). Sehingga secara statistik variabel Indeks Gini (X4) tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). Adapun nilai koefisien yang dihasilkan oleh variabel Indeks Gini (X4) adalah sebesar 9.568741 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen Indeks Gini akan

berpengaruh terhadap naiknya jumlah penduduk miskin DIY sebesar 9.568741 ribu jiwa setiap tahunnya.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Indeks Gini berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang ada. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanto, 2016) dan juga (Atmojo, 2018) yang meneliti pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000-2010 dan juga di provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016 yang menghasilkan bahwa indeks gini berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Artinya jika terjadi peningkatan pada nilai indeks gini, maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Hal ini disebabkan karena Indeks Gini adalah suatu alat ukur dalam menghitung kesenjangan pendapatan yang ada di suatu populasi atau masyarakat. Semakin tidak merata distribusi pendapatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan yang ada dalam masyarakat tersebut. Pendapatan yang tidak merata menyebabkan kesejahteraan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh beberapa persen orang tertentu saja. Sehingga inilah mungkin yang melatar belakangi adanya anggapan bahwa “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin”. Anggapan tersebut akan sangat mungkin terjadi jika memang adanya kesenjangan pendapatan yang sangat besar dalam masyarakat.

Dalam penelitian kali ini, nilai Indeks Gini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY. Jika kita melihat pada data presentase penduduk menurut kabupaten/kota dan kelompok pengeluaran, maka keadaan inipun dapat dijelaskan. Melalui laporan yang

dikeluarkan oleh (BAPPEDA, 2017) tentang analisis ketimpangan di Provinsi DIY menunjukkan bahwa penduduk pada kelompok menengah atas mengalami kenaikan 0,01 poin dan kelompok bawah atas juga mengalami kenaikan 0,04 poin. Indikasi ini menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran perkapita penduduk yang hanya terjadi pada 2 quantile di atas yaitu bawah atas dan menengah atas. Hal inilah yang mungkin mengindikasikan bahwa kenaikan ketimpangan yang terjadi di Provinsi DIY tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yang ada. Yaitu yang disebabkan karena tidak adanya perubahan yang cukup signifikan pada penduduk kelompok bawah terhadap pengeluaran perkapita mereka yang mana hal tersebut tidak terjadi pada kelompok penduduk menengah atas yang terus mengalami kenaikan pengeluaran perkapita. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Perubahan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok
Kuantil Pengeluaran Perkapita di D.I. Yogyakarta (persen)

Kabupaten/kota	Kelompok Quantile				
	1	2	3	4	5
Bantul	3,40	3,09	(1,10)	(4,14)	(1,25)
Gunung Kidul	(1,74)	(6,18)	8,83	(0,65)	(0,25)
Kulonprogo	8,43	(9,15)	4,15	(0,08)	(3,35)
Kota Yogyakarta	(1,28)	7,85	(6,04)	1,49	(2,02)
Sleman	(4,41)	1,76	(3,84)	3,44	3,06
D.I. Yogyakarta	(0,02)	0,04	(0,01)	0,01	(0,01)

Sumber : Susenas Maret 2015 dan 2016, diolah
Angka dalam kurung menunjukkan angka negatif

Selain itu, hal tersebut juga dapat disebabkan karena mungkin masyarakat miskin masih dapat menjangkau berbagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap harinya. Sehingga dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang begitu tinggi bahkan berada pada posisi tertinggi di Indonesia dengan persentase mencapai 0,43 persen, hal tersebut bukan menjadi masalah yang cukup serius bagi penduduk miskin di Provinsi DIY. Hal tersebut dapat dilihat melalui data dari BPS yang menyatakan bahwa DIY merupakan daerah cukup bahagia dengan nilai indeks kebahagiaan masyarakat mencapai 70,77 persen dari skala indeks 0 – 100. Hasil tersebut kata Bambang Kristanto selaku kepala BPS Yogyakarta yang dimuat dalam situs republika.co.id merupakan skala yang masuk dalam kategori cukup bahagia di atas rata – rata. Indeks Kebahagiaan tersebut disusun atas tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial di DIY. Artinya adalah bahwa penduduk DIY telah merasa cukup bahagia yang diukur melalui 10 aspek tersebut yang telah merefleksikan tingkat kebahagiaan penduduk (Maharani, 2018).

Ghifari sebagai staff Departemen Redaksi dan Penelitian HIMIESPA FEB UGM juga menuliskan dalam kompasiana.com sebagai situs blogging terkenal di Indonesia, bahwa fenomena seperti ini dapat terjadi karena akibat dari budaya masyarakat DIY yang terkenal dengan kesederhanaannya. Mereka (penduduk DIY) tidak berorientasi terhadap kekayaan, akan tetapi beranggapan bahwa hidup adalah tentang segala sesuatu yang tercukupi. Tidak berlebihan tetapi juga tidak kekurangan. Mereka akan tetap hidup bahagia meskipun tanpa kekayaan yang berlebih (Firman, 2018). Walaupun tetap, ketimpangan yang terjadi di DIY merupakan masalah yang serius dan akan terus dicarikan solusi pemecahannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode tahun 2008 – 2015, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang digambarkan dengan menggunakan data PMDN dalam satuan milyar rupiah pada setiap masing – masing Kabupaten / Kota di Provinsi DIY memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ada di masyarakat akan menyebabkan penurunan pada jumlah penduduk miskin.
2. Penanaman Modal Asing (PMA) yang digambarkan dengan menggunakan data PMA dalam satuan juta dollar pada setiap masing – masing Kabupaten / Kota di Provinsi DIY memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di masyarakat akan menyebabkan penurunan pada jumlah penduduk miskin.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan satuan persen pada setiap masing – masing Kabupaten / Kota di Provinsi DIY memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada.

Hal inipun menunjukkan bahwa adanya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY, maka akan menyebabkan kenaikan pula terhadap jumlah penduduk miskin. Jika dilihat lagi maka hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan teori pembangunan manusia. Karena jika kualitas seseorang meningkat maka akan meningkat pulalah produktivitas seseorang tersebut yang pada gilirannya nanti akan mempermudah dia keluar dari jurang kemiskinan. Penyebab keadaan yang bertolak belakang tersebut adalah karena adanya program pembangunan pemerintah yang menyangkut tiga indikator IPM yaitu seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat berjalan kurang optimal. Belum optimalnya program pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat dengan belum banyaknya program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi para penduduk miskin.

4. Indeks Gini yang menggunakan satuan persen pada setiap masing – masing Kabupaten / Kota di Provinsi DIY memiliki pengaruh tidak signifikan yang positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan di awal bahwa nilai Indeks Gini akan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun dalam penelitian ini Indeks Gini tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut disebabkan karena mungkin masyarakat miskin masih dapat menjangkau berbagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap harinya. Sehingga dengan

adanya ketimpangan yang terjadi di masyarakat bukan menjadi masalah yang cukup serius bagi penduduk miskin yang ada di Provinsi DIY. Termasuk juga karena adanya peningkatan pengeluaran penduduk perkapita kelompok atas yang mana tidak terjadi pada kelompok penduduk bawah. Walaupun tetap, ketimpangan yang terjadi di DIY masih merupakan masalah yang serius dan akan terus dicarikan solusi pemecahannya.

5.2. Implikasi

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal tersebut menimbulkan adanya implikasi sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh signifikan yang negatif antara PMDN dan PMA terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi DIY menunjukkan suatu sinyal tersendiri sebagai salah satu faktor yang mampu menekan atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Untuk itu pemerintah Provinsi DIY khususnya yang berada di masing – masing Kabupaten/Kota di DIY dapat terus berupaya dalam meningkatkan nilai investasi yang terjadi di setiap daerahnya tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuka banyak kran investasi di berbagai sektor seperti pariwisata atau jasa maupun dengan mempermudah proses investasi yang terjadi di suatu daerah mulai dari registrasi maupun proses izin yang ada di dalamnya. Proses distribusi hasil investasi tersebutlah yang mungkin perlu diingat agar memberikan dampak

terhadap perekonomian secara luas dan bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja.

2. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan namun positif terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi DIY. Untuk itu berbagai program pembangunan kualitas manusia yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY khususnya yang ada di masing – masing Kabupaten/Kota di DIY harus dapat memberikan akses terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Pengalih fungsian lahan pertanian menjadi perhotelan maupun perumahan dapat menurunkan kepemilikan aset produktif yang dimiliki oleh para petani. Redistribusi aset terhadap para petani dapat dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya dalam meningkatkan akses masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya disamping dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menekan laju ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
3. Indeks Gini memiliki pengaruh tidak signifikan yang positif terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi DIY. Walaupun Indeks Kebahagiaan di DIY menunjukkan angka relatif tinggi yang menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi seakan tidak menjadi masalah yang serius bagi penduduk miskin, akan tetapi ketimpangan tetap menjadi masalah perekonomian yang harus dicarikan solusi pemecahannya. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat seperti peningkatan pembangunan daerah pinggir guna mengurangi

ketimpangan yang terjadi antar daerah maupun peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi terhadap masyarakat miskin di DIY.

Kemiskinan yang terjadi di Provinsi DIY memberikan warna tersendiri terhadap program – program penanggulangan kemiskinan di Provinsi tersebut. Terdapat beberapa anomali yang terjadi jika kita melihat kemiskinan di DIY dari berbagai aspek keadaan. Hal tersebutlah yang juga sebenarnya melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Jika kita melihat dari sisi yang mungkin berbeda, angka kemiskinan DIY selalu menunjukkan nilai yang selalu tinggi. Telah banyak pula informasi – informasi yang didapat dimana beberapa masyarakat yang sebenarnya telah tergolong mampu, ternyata masih ikut andil dalam penerimaan bantuan untuk masyarakat miskin. Untuk itu, perlu juga sekiranya adanya validasi data terkait jumlah penduduk miskin yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di DIY. Yaitu yang dapat dilakukan oleh pemerintah bahkan dari tingkat terkecil seperti ketua RT/RW yang seharusnya lebih mengerti keadaan dan kondisi yang dialami oleh masyarakat di lokasi tersebut. Sehingga tercipta keadaan yang lebih konkrit dalam melakukan perumusan program – program penanggulangan kemiskinan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriansyah, B. (2016). *Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Gini Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2013*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, UII.
- Antara. (2017, Maret 25). *Sistem Pendidikan Yogyakarta Dinilai Jauh Dari Sempurna*. Diambil kembali dari <http://www.sinarharapan.co>
- Atmasari, N. (2017, Maret 25). *DIY Provinsi Termiskin di Jawa*. Diambil kembali dari <http://www.harianjogja.com>
- Atmojo, D. (2018, Februari 08). *Analisis Pengaruh Gini Ratio, IPM, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016*. Diambil kembali dari repository.umy.ac.id
- Bappeda. (2016). *Analisis ICOR Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 - 2015*. Yogyakarta: BPS.
- BAPPEDA, B. d. (2016). *Analisis Icor Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *DIY Dalam Angka*. Yogyakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.

- Dinas Pendidikan, P. d. (2018, Januari 14). *Sejarah Singkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diambil kembali dari Pendidikan-diy.go.id: <http://www.pendidikan-diy.go.id>
- Febriaty, H. (2017). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2.
- Febriaty, H. (2017). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 2.
- Firman, G. R. (2018, Februari 08). *Jogja Istimewa (Timpang)*. Diambil kembali dari kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com>
- Jiwana, G. (2017, April 30). *Atasi Kesenjangan Kemiskinan, Ini Program Pemerintah*. Diambil kembali dari : <http://www.harianjogja.com>
- Kotambunan, L. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 01.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN d/h AMP YKPN.
- Maharani, E. (2018, Februari 08). *Survei BPS, Masyarakat DIY Bahagia di atas Rata - Rata*. Diambil kembali dari <http://www.republika.co.id>

- Mankiw, N. G. (2006). *Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga .
- Minggu, T. D. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 18, No. 2.
- Momongan, J. E. (2013). Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya Terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal E MBA*, Vol. 1 No.3.
- Niswati, K. (2014). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 - 2011. *Eko-Regional*, Vol. 9, No. 2, 87.
- Nuraini. (2016). Analisis Pengaruh PMDN dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.16 No.1.
- Prasetyo, E. (2018, Februari 03). *Analisis Pengaruh PMDN, PMA, Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Periode Tahun 1985-2009*. Diambil kembali dari <http://lib.unnes.ac.id>
- Priyanto, D. (2018, Februari 04). *Analisis Pengaruh PMA, PMDN, dan Laju Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 1990-2003*. Diambil kembali dari <https://digilib.uns.ac.id>
- Putra, A. N. (2013). *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa*. Jakarta: Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.

- Reza Lainatul Rizky, d. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *JESP - Vol. 8, No. 1*
- Sahdan, G. (2005). Menanggulangi Kemiskinan Desa. *Artikel - Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*.
- Sihombing, M. (2017, Maret 25). *Indeks Pembangunan Manusia : DKI dan Yogyakarta Tertinggi*. Diambil kembali dari: <http://kabar24.bisnis.com>
- Sjahroni, B. (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: deepublish.
- Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8 No. 2*.
- Sutaryono. (2018, Februari 08). *Miskin Tetapi Sejahtera*. Diambil kembali dari <http://krjogja.com>
- Todaro, M. (2005). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Tribunnews. (2017, Januari 15). *Jumlah Pengangguran di Yogyakarta Tercatat Sebanyak 6.721*. Diambil kembali dari: <http://jogja.tribunnews.com>
- Wati, H. W. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jurnal Ilmiah FEB UB*, 1-13.

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. UII Yogyakarta: Ekonisia.

Widodo, A. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* , Volume 1, Nomor 1.

Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No.02.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (Data Penelitian)

Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY Satuan Ribu Jiwa

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	97,9	164,3	173,5	125,1	48,1
2009	89,9	158,5	163,7	117,5	45,3
2010	90,0	146,9	148,7	117,0	37,8
2011	92,8	159,4	157,1	117,3	37,7
2012	92,4	158,8	156,5	116,8	37,6
2013	86,5	156,6	152,2	110,8	35,6
2014	84,7	153,5	148,4	110,4	36,6
2015	88,1	160,2	155,0	111,0	36,0

Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi DIY Satuan

Milyar Rupiah

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	28,56	86,95	19,59	926,86	744,47
2009	28,56	96,95	29,07	983,46	744,47
2010	34,02	96,95	35,44	962,34	756,18
2011	34,02	189,26	35,50	1218,96	835,41
2012	34,02	191,26	35,50	1242,03	1303,13
2013	34,02	241,02	35,50	1242,24	1311,87
2014	378,47	253,29	35,50	1349,72	1551,56
2015	494,70	268,01	35,50	1431,04	1722,41

Data Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi DIY Satuan Juta dollar

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	0,14	10,30	1,71	38,71	110,72
2009	0,39	12,75	1,71	38,71	111,07
2010	0,32	16,36	1,71	36,72	111,18
2011	0,32	21,00	10,37	244,03	180,98
2012	0,34	24,91	10,70	252,91	183,37
2013	0,29	21,65	9,22	260,25	206,40
2014	41,97	21,04	10,40	243,31	184,70
2015	42,00	25,63	10,16	224,74	240,46

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi DIY Satuan Persen

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	73,26	73,38	70,00	77,24	78,95
2009	73,77	73,75	70,18	77,70	79,29
2010	68,83	75,31	64,20	79,69	82,72
2011	69,53	75,79	64,83	80,04	82,98
2012	69,74	76,13	65,69	80,10	83,29
2013	70,14	76,78	66,31	80,26	83,61
2014	70,68	77,11	67,03	80,73	83,78
2015	71,52	77,99	67,41	81,20	84,56

Data Indeks Gini di Provinsi DIY Satuan Persen

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	0,29	0,32	0,25	0,31	0,18
2009	0,25	0,25	0,24	0,29	0,23
2010	0,24	0,27	0,25	0,28	0,22
2011	0,39	0,38	0,34	0,42	0,38
2012	0,42	0,41	0,36	0,47	0,37
2013	0,31	0,33	0,24	0,39	0,44
2014	0,38	0,32	0,29	0,41	0,40
2015	0,37	0,38	0,32	0,45	0,44

LAMPIRAN 2 (Hasil Estimasi)

Hasil Estimasi *Common Effect Models* (CEM)

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/28/18 Time: 19:22

Sample: 2008 2015

Included observations: 40

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	222.1566	58.82216	3.776749	0.0002
X1?	-0.030525	0.013083	-2.333161	0.0207
X2?	-0.069120	0.069752	-0.990933	0.3229
X3?	-1.732974	0.791189	-2.190342	0.0297
X4?	124.1364	41.53354	2.988823	0.0032
R-squared	0.400361	Mean dependent var		111.9028
Adjusted R-squared	0.388060	S.D. dependent var		44.76499
S.E. of regression	35.01812	Akaike info criterion		9.974290
Sum squared resid	239122.4	Schwarz criterion		10.05675
Log likelihood	-992.4290	Hannan-Quinn criter.		10.00766
F-statistic	32.54887	Durbin-Watson stat		0.071206
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Estimasi *Fixed Effect Models* (FEM)

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/28/18 Time: 19:23

Sample: 2008 2015

Included observations: 40

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.80104	16.71258	3.279030	0.0012
X1?	-0.010324	0.002602	-3.967958	0.0001
X2?	-0.034503	0.009923	-3.477126	0.0006
X3?	0.824163	0.225578	3.653559	0.0003
X4?	9.568741	7.541996	1.268728	0.2061
Fixed Effects (Cross)				
_BNT--C	39.33677			
_GK--C	44.73520			
_KLP--C	-24.39247			
_KY--C	-69.24399			
_SLM--C	9.564488			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.989412	Mean dependent var	111.9028
Adjusted R-squared	0.988969	S.D. dependent var	44.76499
S.E. of regression	4.701630	Akaike info criterion	5.977652
Sum squared resid	4222.117	Schwarz criterion	6.126076
Log likelihood	-588.7652	Hannan-Quinn criter.	6.037717
F-statistic	2231.108	Durbin-Watson stat	1.783620
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Estimasi *Random Effect Models* (REM)

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/28/18 Time: 19:24

Sample: 2008 2015

Included observations: 40

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 200

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	222.1566	7.897627	28.12953	0.0000
X1?	-0.030525	0.001757	-17.37757	0.0000
X2?	-0.069120	0.009365	-7.380548	0.0000
X3?	-1.732974	0.106227	-16.31385	0.0000
X4?	124.1364	5.576409	22.26100	0.0000
Random Effects (Cross)				
_BNT--C	0.000000			
_GK--C	0.000000			
_KLP--C	0.000000			
_KY--C	0.000000			
_SLM--C	0.000000			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			4.701630	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.400361	Mean dependent var		111.9028
Adjusted R-squared	0.388060	S.D. dependent var		44.76499
S.E. of regression	35.01812	Sum squared resid		239122.4
F-statistic	32.54887	Durbin-Watson stat		0.071206
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.400361	Mean dependent var		111.9028
Sum squared resid	239122.4	Durbin-Watson stat		0.071206

LAMPIRAN 3 (Hasil Uji Model Estimasi)

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2656.603092	(4,191)	0.0000
Cross-section Chi-square	807.327789	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 02/20/18 Time: 14:52

Sample: 2008 2015

Included observations: 40

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	222.1566	58.82216	3.776749	0.0002
X1?	-0.030525	0.013083	-2.333161	0.0207
X2?	-0.069120	0.069752	-0.990933	0.3229
X3?	-1.732974	0.791189	-2.190342	0.0297
X4?	124.1364	41.53354	2.988823	0.0032
R-squared	0.400361	Mean dependent var		111.9028
Adjusted R-squared	0.388060	S.D. dependent var		44.76499
S.E. of regression	35.01812	Akaike info criterion		9.974290
Sum squared resid	239122.4	Schwarz criterion		10.05675
Log likelihood	-992.4290	Hannan-Quinn criter.		10.00766
F-statistic	32.54887	Durbin-Watson stat		0.071206
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10626.412370	4	0.0000

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	-0.010324	-0.030525	0.000004	0.0000
X2?	-0.034503	-0.069120	0.000011	0.0000
X3?	0.824163	-1.732974	0.039601	0.0000
X4?	9.568741	124.136419	25.785369	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 02/20/18 Time: 14:54

Sample: 2008 2015

Included observations: 40

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.80104	16.71258	3.279030	0.0012
X1?	-0.010324	0.002602	-3.967958	0.0001
X2?	-0.034503	0.009923	-3.477126	0.0006
X3?	0.824163	0.225578	3.653559	0.0003
X4?	9.568741	7.541996	1.268728	0.2061

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.989412	Mean dependent var	111.9028
Adjusted R-squared	0.988969	S.D. dependent var	44.76499
S.E. of regression	4.701630	Akaike info criterion	5.977652
Sum squared resid	4222.117	Schwarz criterion	6.126076
Log likelihood	-588.7652	Hannan-Quinn criter.	6.037717
F-statistic	2231.108	Durbin-Watson stat	1.783620
Prob(F-statistic)	0.000000		